



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG

LAPORAN KEUANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PROVINSI JAWA TENGAH



2025



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

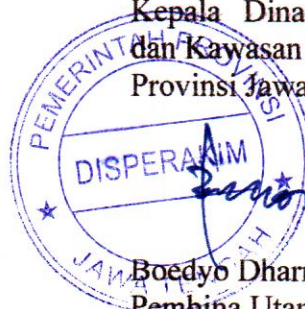
Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang tersedia serta keberhasilan capaian saat ini untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di tahun yang akan datang, sekaligus sebagai pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah.

Demikian, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang,

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah



Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang,
PENGUNA ANGGARAN

Boedyo Dharmawan, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691012 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
	Jumlah Belanja	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
	Surplus/(Defisit)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837

Semarang, 31 Desember 2025
PPK : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut.MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
5.1	BELANJA OPERASI	46.798.007.000	46.009.192.967	98,31	788.814.033
5.2	BELANJA MODAL	387.000.000	381.985.870	98,70	5.014.130
	Jumlah Belanja	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
	Surplus/(Defisit)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837

Semarang, 31 Desember 2025
PPK- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut.MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
5.1	BELANJA OPERASI	46.798.007.000	46.009.192.967	98,31	788.814.033
5.1.1	Belanja Pegawai	13.183.059.000	12.698.935.072	96,33	484.123.928
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.789.948.000	15.486.167.896	98,08	303.780.104
5.1.5	Belanja Hibah	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0
5.2	BELANJA MODAL	387.000.000	381.985.870	98,70	5.014.130
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.000.000	219.200.000	98,74	2.800.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130
	Jumlah Belanja	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
	Surplus/(Defisit)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837

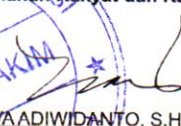
Semarang, 31 Desember 2025
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


(NOVAADIWIDANTO, S.Hut,MSi)
NIP. 19731113 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
5.1	BELANJA OPERASI	46.798.007.000	46.009.192.967	98,31	788.814.033
5.1.1	Belanja Pegawai	13.183.059.000	12.698.935.072	96,33	484.123.928
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.891.559.000	5.665.925.944	96,17	225.633.056
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.291.500.000	7.033.009.128	96,45	258.490.872
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.789.948.000	15.486.167.896	98,08	303.780.104
5.1.2.1	Belanja Barang	2.701.040.000	2.653.595.691	98,24	47.444.309
5.1.2.2	Belanja Jasa	10.064.090.000	9.904.196.944	98,41	159.893.056
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	570.258.000	566.949.914	99,42	3.308.086
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.354.960.000	2.278.625.347	96,76	76.334.653
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99.600.000	82.800.000	83,13	16.800.000
5.1.5	Belanja Hibah	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0
5.2	BELANJA MODAL	387.000.000	381.985.870	98,70	5.014.130
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.000.000	219.200.000	98,74	2.800.000
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	87.500.000	85.100.000	97,26	2.400.000
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000	49.600.000	99,20	400.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	84.500.000	84.500.000	100	0
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130
	Jumlah Belanja	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
	Surplus/(Defisit)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837

Semarang, 31 Desember 2025
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, MSi)
NIP. 19731113.199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
5.1	BELANJA OPERASI	46.798.007.000	46.009.192.967	98,31	788.814.033
5.1.1	Belanja Pegawai	13.183.059.000	12.698.935.072	96,33	484.123.928
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.891.559.000	5.665.925.944	96,17	225.633.056
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.274.898.000	4.251.320.762	99,45	23.577.238
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	375.500.000	363.128.502	96,71	12.371.498
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	187.880.000	180.320.000	95,98	7.560.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	160.325.000	127.675.000	79,64	32.650.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	103.300.000	89.240.000	86,39	14.060.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	213.000.000	206.565.980	96,98	6.434.020
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	131.800.000	50.112.128	38,02	81.687.872
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	120.000	60.282	50,24	59.718
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	372.500.000	362.673.349	97,36	9.826.651
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	8.707.438	91,66	792.562
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	26.122.503	96,75	877.497
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	35.736.000	0	0	35.736.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.291.500.000	7.033.009.128	96,45	258.490.872
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.291.500.000	7.033.009.128	96,45	258.490.872
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.789.948.000	15.486.167.896	98,08	303.780.104
5.1.2.1	Belanja Barang	2.701.040.000	2.653.595.691	98,24	47.444.309
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	2.701.040.000	2.653.595.691	98,24	47.444.309
5.1.2.2	Belanja Jasa	10.064.090.000	9.904.196.944	98,41	159.893.056
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.699.676.000	5.554.861.326	97,46	144.814.674
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	303.299.000	297.987.828	98,25	5.311.172
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	115.000.000	114.384.000	99,46	616.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	258.728.000	256.160.250	99,01	2.567.750
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.656.217.000	3.653.853.540	99,94	2.363.460
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.170.000	26.950.000	86,46	4.220.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	570.258.000	566.949.914	99,42	3.308.086
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	340.633.000	337.325.914	99,03	3.307.086
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	229.625.000	229.624.000	100	1.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.354.960.000	2.278.625.347	96,76	76.334.653
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.354.960.000	2.278.625.347	96,76	76.334.653
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99.600.000	82.800.000	83,13	16.800.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99.600.000	82.800.000	83,13	16.800.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.5	Belanja Hibah	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0
5.2	BELANJA MODAL	387.000.000	381.985.870	98,70	5.014.130
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.000.000	219.200.000	98,74	2.800.000
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	87.500.000	85.100.000	97,26	2.400.000
5.2.2.5.1	Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000	14.400.000	96	600.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	72.500.000	70.700.000	97,52	1.800.000
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000	49.600.000	99,20	400.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000	49.600.000	99,20	400.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	84.500.000	84.500.000	100	0
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	84.500.000	84.500.000	100	0
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130
	Jumlah Belanja	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
	Surplus/(Defisit)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837

PEMERINTAH PROVINSI
DISPERKUMHUTAN
JAWA TENGAH

Semarang, 31 Desember 2025
PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

(NOVA ADI WIDANTO, S.Hut.MSi)
NIP.19731113 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
5.1	BELANJA OPERASI	46.798.007.000	46.009.192.967	98,31	788.814.033
5.1.1	Belanja Pegawai	13.183.059.000	12.698.935.072	96,33	484.123.928
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.891.559.000	5.665.925.944	96,17	225.633.056
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.274.898.000	4.251.320.762	99,45	23.577.238
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	3.619.683.000	3.619.669.840	100	13.160
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	655.215.000	631.650.922	96,40	23.564.078
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	375.500.000	363.128.502	96,71	12.371.498
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	340.000.000	333.610.862	98,12	6.389.138
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	35.500.000	29.517.640	83,15	5.982.360
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	187.880.000	180.320.000	95,98	7.560.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	187.880.000	180.320.000	95,98	7.560.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	160.325.000	127.675.000	79,64	32.650.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	92.555.000	92.535.000	99,98	20.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	67.770.000	35.140.000	51,85	32.630.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	103.300.000	89.240.000	86,39	14.060.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.350.000	89.240.000	98,77	1.110.000
5.1.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.950.000	0	0	12.950.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	213.000.000	206.565.980	96,98	6.434.020
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	185.000.000	181.556.940	98,14	3.443.060
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	28.000.000	25.009.040	89,32	2.990.960
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	131.800.000	50.112.128	38,02	81.687.872
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	131.800.000	50.112.128	38,02	81.687.872
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	120.000	60.282	50,24	59.718
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.000	52.551	52,55	47.449
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	20.000	7.731	38,66	12.269
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	372.500.000	362.673.349	97,36	9.826.651
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	338.500.000	333.295.676	98,46	5.204.324
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	34.000.000	29.377.673	86,40	4.622.327
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	8.707.438	91,66	792.562
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.000.000	7.339.978	91,75	660.022
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	1.367.460	91,16	132.540

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	26.122.503	96,75	877.497
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22.500.000	22.020.283	97,87	479.717
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.500.000	4.102.220	91,16	397.780
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	35.736.000	0	0	35.736.000
5.1.1.1.12.1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	28.342.000	0	0	28.342.000
5.1.1.1.12.2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	7.394.000	0	0	7.394.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.291.500.000	7.033.009.128	96,45	258.490.872
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.291.500.000	7.033.009.128	96,45	258.490.872
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.170.000.000	6.911.509.128	96,39	258.490.872
5.1.1.2.1.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	121.500.000	121.500.000	100	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.789.948.000	15.486.167.896	98,08	303.780.104
5.1.2.1	Belanja Barang	2.701.040.000	2.653.595.691	98,24	47.444.309
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	2.701.040.000	2.653.595.691	98,24	47.444.309
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	265.000.000	264.900.000	99,96	100.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	32.026.000	32.000.000	99,92	26.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	135.479.000	134.804.540	99,50	674.460
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	160.225.000	159.692.500	99,67	532.500
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.700.000	16.682.000	99,89	18.000
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32.026.000	31.871.000	99,52	155.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.013.000	6.013.000	100	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.810.000	12.810.000	100	0
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.226.100.000	1.190.329.151	97,08	35.770.849
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	797.111.000	786.968.500	98,73	10.142.500
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.550.000	17.525.000	99,86	25.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	10.064.090.000	9.904.196.944	98,41	159.893.056
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.699.676.000	5.554.861.326	97,46	144.814.674
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	435.387.000	409.260.000	94	26.127.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	126.116.000	125.116.000	99,21	1.000.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.023.832.000	2.941.812.000	97,29	82.020.000

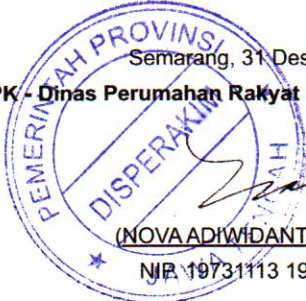
Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	87.168.000	87.168.000	100	0
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	131.532.000	131.532.000	100	0
5.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.000.000	10.500.000	87,50	1.500.000
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	107.650.000	107.606.000	99,96	44.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	303.922.000	303.824.952	99,97	97.048
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	612.000.000	611.871.960	99,98	128.040
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	100.000.000	99.984.000	99,98	16.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	11.932.000	10.726.000	89,89	1.206.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	46.000.000	45.498.171	98,91	501.829
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	16.000.000	15.868.962	99,18	131.038
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	341.057.000	334.949.281	98,21	6.107.719
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.330.000	3.000.000	90,09	330.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.350.000	21.744.000	89,30	2.606.000
5.1.2.2.1.80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	317.400.000	294.400.000	92,75	23.000.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	303.299.000	297.987.828	98,25	5.311.172
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	133.259.000	129.638.739	97,28	3.620.261
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.710.000	6.191.252	92,27	518.748
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.330.000	7.746.944	93	583.056
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	154.410.893	99,62	589.107
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	115.000.000	114.384.000	99,46	616.000
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.000.000	8.000.000	100	0
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	107.000.000	106.384.000	99,42	616.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	258.728.000	256.160.250	99,01	2.567.750
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	133.728.000	133.727.250	100	750
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	125.000.000	122.433.000	97,95	2.567.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.656.217.000	3.653.853.540	99,94	2.363.460
5.1.2.2.9.11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.999.886.000	2.999.876.480	100	9.520
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	452.136.000	452.013.460	99,97	122.540
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	204.195.000	201.963.600	98,91	2.231.400

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.170.000	26.950.000	86,46	4.220.000
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	31.170.000	26.950.000	86,46	4.220.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	570.258.000	566.949.914	99,42	3.308.086
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	340.633.000	337.325.914	99,03	3.307.086
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.250.000	16.250.000	100	0
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	226.100.000	222.792.914	98,54	3.307.086
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	12.810.000	12.810.000	100	0
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28.055.000	28.055.000	100	0
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	57.418.000	57.418.000	100	0
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	229.625.000	229.624.000	100	1.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	229.625.000	229.624.000	100	1.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.354.960.000	2.278.625.347	96,76	76.334.653
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.354.960.000	2.278.625.347	96,76	76.334.653
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.354.960.000	2.278.625.347	96,76	76.334.653
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99.600.000	82.800.000	83,13	16.800.000
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99.600.000	82.800.000	83,13	16.800.000
5.1.2.5.2.1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	99.600.000	82.800.000	83,13	16.800.000
5.1.5	Belanja Hibah	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2	BELANJA MODAL	387.000.000	381.985.870	98,70	5.014.130
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.000.000	219.200.000	98,74	2.800.000
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	87.500.000	85.100.000	97,26	2.400.000
5.2.2.5.1	Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000	14.400.000	96	600.000
5.2.2.5.1.5	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.000.000	14.400.000	96	600.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	72.500.000	70.700.000	97,52	1.800.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	72.500.000	70.700.000	97,52	1.800.000
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000	49.600.000	99,20	400.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000	49.600.000	99,20	400.000
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	50.000.000	49.600.000	99,20	400.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	84.500.000	84.500.000	100	0
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	84.500.000	84.500.000	100	0
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	84.500.000	84.500.000	100	0
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130
	Jumlah Belanja	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163
	Surplus/(Defisit)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837

Semarang, 31 Desember 2025

PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



(NOVA ADI WIDANTO, S.Hut,MSi)

NIR 19731113 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang	ALASAN REALISASI ANGGARAN TIDAK TERSERAP KURANG DARI 95%
5	BELANJA DAERAH	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163	
5.1	BELANJA OPERASI	46.798.007.000	46.009.192.967	98,31	788.814.033	
5.1.1	Belanja Pegawai	13.183.059.000	12.698.935.072	96,33	484.123.928	
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.891.559.000	5.665.925.944	96,17	225.633.056	
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.274.898.000	4.251.320.762	99,45	23.577.238	
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	3.619.683.000	3.619.669.840	100	13.160	
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	655.215.000	631.650.922	96,40	23.564.078	
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	375.500.000	363.128.502	96,71	12.371.498	
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	340.000.000	333.610.862	98,12	6.389.138	
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	35.500.000	29.517.640	83,15	5.982.360	Sesuai dengan dinamika kepegawaian (menyesuaikan jumlah suami/istri dan anak)
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	187.880.000	180.320.000	95,98	7.560.000	
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	187.880.000	180.320.000	95,98	7.560.000	
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	160.325.000	127.675.000	79,64	32.650.000	
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	92.555.000	92.535.000	99,98	20.000	
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	67.770.000	35.140.000	51,85	32.630.000	Belum ada pelantikan sesuai jabatan yang dianggarkan
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	103.300.000	89.240.000	86,39	14.060.000	
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.350.000	89.240.000	98,77	1.110.000	
5.1.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.950.000	0	0	12.950.000	Tidak terealisasi karena menyesuaikan dengan jabatan yang ada
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	213.000.000	206.565.980	96,98	6.434.020	
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	185.000.000	181.556.940	98,14	3.443.060	
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	28.000.000	25.009.040	89,32	2.990.960	Sesuai dengan dinamika kepegawaian (pensiun 2 orang dan cuti diluar tanggungan negara 1 orang)
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	131.800.000	50.112.128	38,02	81.687.872	
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	131.800.000	50.112.128	38,02	81.687.872	Sesuai perhitungan pajak dengan dinamika kepegawaian (pensiun 2 orang dan cuti diluar tanggungan negara 1 orang)
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	120.000	60.282	50,24	59.718	
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.000	52.551	52,55	47.449	Sesuai dengan dinamika kepegawaian (pensiun 2 orang dan cuti diluar tanggungan negara 1 orang)
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	20.000	7.731	38,66	12.269	Sesuai dengan dinamika kepegawaian (pensiun 2 orang dan cuti diluar tanggungan negara 1 orang)
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	372.500.000	362.673.349	97,36	9.826.651	
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	338.500.000	333.295.676	98,46	5.204.324	
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	34.000.000	29.377.673	86,40	4.622.327	Sesuai dengan dinamika kepegawaian (pensiun 2 orang dan cuti diluar tanggungan negara 1 orang)
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000	8.707.438	91,66	792.562	
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.000.000	7.339.978	91,75	660.022	Sesuai dengan dinamika kepegawaian (pensiun 2 orang dan cuti diluar tanggungan negara 1 orang)
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.500.000	1.367.460	91,16	132.540	Sesuai dengan dinamika kepegawaian (pensiun 2 orang dan cuti diluar tanggungan negara 1 orang)
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000	26.122.503	96,75	877.497	
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22.500.000	22.020.283	97,87	479.717	

5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.500.000	4.102.220	91,16	397.780	Sesuai dengan dinamika kepegawaian (pensiun 2 orang dan cuti diluar tanggungan negara 1 orang)
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	35.736.000	0	0	35.736.000	
5.1.1.1.12.1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	28.342.000	0	0	28.342.000	Belum ada peraturan terkait realisasi Belanja TAPERA
5.1.1.1.12.2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	7.394.000	0	0	7.394.000	Belum ada peraturan terkait realisasi Belanja TAPERA
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.291.500.000	7.033.009.128	96,45	258.490.872	
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.291.500.000	7.033.009.128	96,45	258.490.872	
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.170.000.000	6.911.509.128	96,39	258.490.872	
5.1.1.2.1.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	121.500.000	121.500.000	100	0	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.789.948.000	15.486.167.896	98,08	303.780.104	
5.1.2.1	Belanja Barang	2.701.040.000	2.653.595.691	98,24	47.444.309	
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	2.701.040.000	2.653.595.691	98,24	47.444.309	
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	265.000.000	264.900.000	99,96	100.000	
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	32.026.000	32.000.000	99,92	26.000	
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	135.479.000	134.804.540	99,50	674.460	
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	160.225.000	159.692.500	99,67	532.500	
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.700.000	16.682.000	99,89	18.000	
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32.026.000	31.871.000	99,52	155.000	
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.013.000	6.013.000	100	0	
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.810.000	12.810.000	100	0	
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.226.100.000	1.190.329.151	97,08	35.770.849	
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	797.111.000	786.968.500	98,73	10.142.500	
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.550.000	17.525.000	99,86	25.000	
5.1.2.2	Belanja Jasa	10.064.090.000	9.904.196.944	98,41	159.893.056	
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.699.676.000	5.554.861.326	97,46	144.814.674	
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	435.387.000	409.260.000	94	26.127.000	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi infrastruktur bersama 6 OPD rumpun infras yg direncanakan dilaksanakan di 3 bakorwil hanya di laksanakan 1x di semarang oleh dinas PU PUSDATARU
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	126.116.000	125.116.000	99,21	1.000.000	
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.023.832.000	2.941.812.000	97,29	82.020.000	
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	87.168.000	87.168.000	100	0	
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	131.532.000	131.532.000	100	0	
5.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.000.000	10.500.000	87,50	1.500.000	sisa honor instruktur senam menyesuaikan dengan kegiatan dan libur pada hari jumat
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	107.650.000	107.606.000	99,96	44.000	
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	303.922.000	303.824.952	99,97	97.048	
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	612.000.000	611.871.960	99,98	128.040	
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	100.000.000	99.984.000	99,98	16.000	
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	11.932.000	10.726.000	89,89	1.206.000	efisiensi belanja
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	46.000.000	45.498.171	98,91	501.829	
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	16.000.000	15.868.962	99,18	131.038	
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	341.057.000	334.949.281	98,21	6.107.719	

5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.330.000	3.000.000	90,09	330.000	Sisa langganan surat kabar dan majalah (sudah tidak berlangganan lagi sejak adanya efisiensi anggaran)
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.350.000	21.744.000	89,30	2.606.000	Sisa pembayaran pajak kendaraan dan jasa servis kendaraan pejabat (sesuai tagihan pajak dan jasa servis)
5.1.2.2.1.80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	317.400.000	294.400.000	92,75	23.000.000	Tidak terserapnya Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dikarenakan sesuai dengan kebutuhan (Honor KPA 1 orang sebanyak 10 bulan tidak terealisasi karena pensiun
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	303.299.000	297.987.828	98,25	5.311.172	
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	133.259.000	129.638.739	97,28	3.620.261	
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.710.000	6.191.252	92,27	518.748	Karena 6 orang Non ASN diterima PPPK dan sisa hasil pembulatan anggaran
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.330.000	7.746.944	93	583.056	Karena 6 orang Non ASN diterima PPPK dan sisa hasil pembulatan anggaran
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155.000.000	154.410.893	99,62	589.107	
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	115.000.000	114.384.000	99,46	616.000	
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.000.000	8.000.000	100	0	
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	107.000.000	106.384.000	99,42	616.000	
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	258.728.000	256.160.250	99,01	2.567.750	
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	133.728.000	133.727.250	100	750	
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	125.000.000	122.433.000	97,95	2.567.000	
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.656.217.000	3.653.853.540	99,94	2.363.460	
5.1.2.2.9.11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.999.886.000	2.999.876.480	100	9.520	
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	452.136.000	452.013.460	99,97	122.540	
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	204.195.000	201.963.600	98,91	2.231.400	
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.170.000	26.950.000	86,46	4.220.000	
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	31.170.000	26.950.000	86,46	4.220.000	Sisa pembayaran retribusi pelatihan dan kursus singkat (menyesuaikan pelaksanaan pelatihan dan kursus singkat)
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	570.258.000	566.949.914	99,42	3.308.086	
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	340.633.000	337.325.914	99,03	3.307.086	
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.250.000	16.250.000	100	0	
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	226.100.000	222.792.914	98,54	3.307.086	
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel	12.810.000	12.810.000	100	0	
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28.055.000	28.055.000	100	0	
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	57.418.000	57.418.000	100	0	
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	229.625.000	229.624.000	100	1.000	
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	229.625.000	229.624.000	100	1.000	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.354.960.000	2.278.625.347	96,76	76.334.653	

5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.354.960.000	2.278.625.347	96,76	76.334.653	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.354.960.000	2.278.625.347	96,76	76.334.653	
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99.600.000	82.800.000	83,13	16.800.000	
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99.600.000	82.800.000	83,13	16.800.000	
5.1.2.5.2.1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	99.600.000	82.800.000	83,13	16.800.000	penyesuaian biaya PNBP Tahun 2025 dari Badan Pertanahan Nasional dari semua Rp 315.000 menjadi Rp 245.000 /bidang tanah (ketentuan dari Kantor BPN)
5.1.5	Belanja Hibah	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001	
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001	
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001	
5.1.5.5.3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000	224.089.999	99,60	910.001	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0	
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0	
5.1.6.1.2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0	
5.1.6.1.2.1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	17.600.000.000	17.600.000.000	100	0	
5.2	BELANJA MODAL	387.000.000	381.985.870	98,70	5.014.130	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.000.000	219.200.000	98,74	2.800.000	
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	87.500.000	85.100.000	97,26	2.400.000	
5.2.2.5.1	Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000	14.400.000	96	600.000	
5.2.2.5.1.5	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.000.000	14.400.000	96	600.000	
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	72.500.000	70.700.000	97,52	1.800.000	
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin	72.500.000	70.700.000	97,52	1.800.000	
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000	49.600.000	99,20	400.000	
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000	49.600.000	99,20	400.000	
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	50.000.000	49.600.000	99,20	400.000	
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	84.500.000	84.500.000	100	0	
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	84.500.000	84.500.000	100	0	
5.2.2.10.1.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	84.500.000	84.500.000	100	0	
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130	
5.2.6.1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130	
5.2.6.1.1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130	
5.2.6.1.1.5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	165.000.000	162.785.870	98,66	2.214.130	
	Jumlah Belanja	47.185.007.000	46.391.178.837	98,32	793.828.163	
	Surplus/(Defisit)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(46.391.178.837)	100	46.391.178.837	

Semarang, 31 Desember 2025
 PPK - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



(NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi)
 NIP. 19731113 199803 1 003

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	#DIV/0!	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	#DIV/0!	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	#DIV/0!	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	#DIV/0!	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	#DIV/0!	-
8	Pajak Rokok		-	-	#DIV/0!	-
9	Pajak Alat Berat		-	-	#DIV/0!	-
10	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)		-	-	#DIV/0!	-
11	Retribusi Daerah		-	-	#DIV/0!	-
12	Retribusi Jasa Umum		-	-	#DIV/0!	-
13	Retribusi Jasa Usaha		-	-	#DIV/0!	-
14	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-	#DIV/0!	-
15	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
18	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-	#DIV/0!	-
19	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
20	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
21	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
22	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
23	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	#DIV/0!	-
24	Jasa Giro		-	-	#DIV/0!	-
25	Hasil Pengelolaan Dana Berqulir		-	-	#DIV/0!	-
26	Pendapatan Bunga		-	-	#DIV/0!	-
27	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	#DIV/0!	-
28	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-	#DIV/0!	-
29	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	#DIV/0!	-
30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	#DIV/0!	-
31	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	#DIV/0!	-
32	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-	#DIV/0!	-
33	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	#DIV/0!	-
34	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	#DIV/0!	-
35	Pendapatan BLUD		-	-	#DIV/0!	-
36	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
37	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	#DIV/0!	-
38	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Berqulir		-	-	#DIV/0!	-
39	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	#DIV/0!	-
40	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	#DIV/0!	-
41	Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf		-	-	#DIV/0!	-
42	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perijinan/Kontrak		-	-	#DIV/0!	-
43	Pungutan bagi Wisatawan Asing		-	-	#DIV/0!	-
44	Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah		-	-	#DIV/0!	-
45	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		-	-	#DIV/0!	-
46						
47	PENDAPATAN TRANSFER					
48	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
49	Dana Perimbangan		-	-	#DIV/0!	-
50	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	#DIV/0!	-
51	Insentif Fiskal		-	-	#DIV/0!	-
52	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-	#DIV/0!	-
53	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-	#DIV/0!	-
54	Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-	#DIV/0!	-
55	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	#DIV/0!	-
56	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	#DIV/0!	-
57	Bantuan Keuangan		-	-	#DIV/0!	-
58	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	#DIV/0!	-
59						
60	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
61	Pendapatan Hibah		-	-	#DIV/0!	-
62	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
63	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
64	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	#DIV/0!	-
65	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	#DIV/0!	-
66	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	#DIV/0!	-
67	Dana Darurat		-	-	#DIV/0!	-
68	Dana Darurat		-	-	#DIV/0!	-
69	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	#DIV/0!	-
70	Lain-lain Pendapatan		-	-	#DIV/0!	-
71	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	-	#DIV/0!	-
72	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara		-	-	#DIV/0!	-
73	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat		-	-	#DIV/0!	-
74	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
75						
76	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		-	-	#DIV/0!	-
77						
78	BELANJA DAERAH					
79	BELANJA OPERASI					
80	Belanja Pegawai		13.183.059.000,00	12.696.935.072,00	96,33	13.603.409.204,00
81	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		5.891.559.000,00	5.665.925.944,00	96,17	5.648.705.720,00
82	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		7.291.500.000,00	7.033.009.128,00	96,45	7.515.943.484,00
83	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	-	#DIV/0!	-
84	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	#DIV/0!	-
85	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	#DIV/0!	-
86	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	#DIV/0!	-
87	Belanja Pegawai BOS		-	-	#DIV/0!	-
88	Belanja Pegawai BOSP		-	-	#DIV/0!	-
89	Belanja Pegawai BLUD		-	-	#DIV/0!	-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
			2025	2025		2024
90	Belanja Barang dan Jasa		15.789.948.000,00	15.486.167.896,00	98,08	17.192.369.571,00
91	Belanja Barang		2.701.040.000,00	2.653.595.691,00	98,24	4.341.255.193,00
92	Belanja Jasa		10.064.090.000,00	9.904.196.944,00	98,41	6.425.238.501,00
93	Belanja Pemeliharaan		570.258.000,00	566.949.914,00	99,42	686.716.971,00
94	Belanja Perjalanan Dinas		2.354.960.000,00	2.278.625.347,00	96,76	5.721.158.906,00
95	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		99.600.000,00	82.800.000,00	83,13	18.000.000,00
96	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	#DIV/0!	-
97	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	#DIV/0!	-
98	Belanja Barang dan Jasa BOSP		-	-	#DIV/0!	-
99	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-	#DIV/0!	-
100	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	#DIV/0!	-
101	Belanja Bunga		-	-	#DIV/0!	-
102	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
103	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
104	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
105	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
106	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	#DIV/0!	-
107	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
108	Belanja Subsidi		-	-	#DIV/0!	-
109	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
110	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
111	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	#DIV/0!	-
112	Belanja Subsidi kepada Koperasi		-	-	#DIV/0!	-
113	Belanja Hibah		225.000.000,00	224.089.999,00	99,60	1.449.833.634,00
114	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
115	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
116	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
117	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
118	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		225.000.000,00	224.089.999,00	99,60	1.449.833.634,00
119	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	#DIV/0!	-
120	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	#DIV/0!	-
121	Belanja Hibah Dana BOSP		-	-	#DIV/0!	-
122	Belanja Bantuan Sosial		17.600.000.000,00	17.600.000.000,00	100,00	28.750.000.000,00
123	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		17.600.000.000,00	17.600.000.000,00	100,00	28.750.000.000,00
124	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	#DIV/0!	-
125	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
126	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	#DIV/0!	-
127	Jumlah Belanja Operasi		46.009.007.000,00	46.009.192.967,00	98,31	60.995.612.409,00
128					#DIV/0!	
129	BELANJA MODAL				#DIV/0!	
130	Belanja Modal Tanah		-	-	#DIV/0!	-
131	Belanja Modal Tanah		-	-	#DIV/0!	-
132	Belanja Modal Tanah BLUD		-	-	#DIV/0!	-
133	Belanja Modal Perakatan dan Mesin		222.000.000,00	219.200.000,00	98,74	1.201.340.800,00
134	Belanja Modal Alat Besar		-	-	#DIV/0!	-
135	Belanja Modal Alat Angkut		-	-	#DIV/0!	-
136	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-	#DIV/0!	-
137	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	#DIV/0!	-
138	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		87.500.000,00	85.100.000,00	97,26	359.240.800,00
139	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		50.000.000,00	49.600.000,00	99,20	493.800.000,00
140	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-	#DIV/0!	-
141	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-	#DIV/0!	-
142	Belanja Modal Alat Persenitatan		-	-	#DIV/0!	-
143	Belanja Modal Komputer		84.500.000,00	84.500.000,00	100,00	348.300.000,00
144	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	#DIV/0!	-
145	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	#DIV/0!	-
146	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	#DIV/0!	-
147	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	#DIV/0!	-
148	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	#DIV/0!	-
149	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	#DIV/0!	-
150	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	#DIV/0!	-
151	Belanja Modal Rambu-rambu		-	-	#DIV/0!	-
152	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	#DIV/0!	-
153	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	#DIV/0!	-
154	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		-	-	#DIV/0!	-
155	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		-	-	#DIV/0!	-
156	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	#DIV/0!	-
157	Belanja Modal Bangunan Gedung		-	-	#DIV/0!	-
158	Belanja Modal Monumen		-	-	#DIV/0!	-
159	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	#DIV/0!	-
160	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-	#DIV/0!	-
161	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		-	-	#DIV/0!	-
162	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	#DIV/0!	-
163	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-	#DIV/0!	-
164	Belanja Modal Bangunan Air		-	-	#DIV/0!	-
165	Belanja Modal Instalasi		-	-	#DIV/0!	-
166	Belanja Modal Jaringan		-	-	#DIV/0!	-
167	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD		-	-	#DIV/0!	-
168	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-	#DIV/0!	1.449.000,00
169	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		-	-	#DIV/0!	1.449.000,00
170	Belanja Modal Barang Bercorak Keseman/Kebudayaan/ Olahraga		-	-	#DIV/0!	-
171	Belanja Modal Hewan		-	-	#DIV/0!	-
172	Belanja Modal Biota Perairan		-	-	#DIV/0!	-
173	Belanja Modal Tanaman		-	-	#DIV/0!	-
174	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	#DIV/0!	-
175	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	#DIV/0!	-
176	Belanja Modal Aset Tidak Benyuud		-	-	#DIV/0!	-
177	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	#DIV/0!	-
178	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		-	-	#DIV/0!	-
179	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		-	-	#DIV/0!	-
180	Belanja Modal Aset Lainnya		165.000.000,00	162.785.870,00	98,66	168.553.500,00
181	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Benyuud		165.000.000,00	162.785.870,00	98,66	168.553.500,00
182	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-	#DIV/0!	-
183	Jumlah Belanja Modal		387.000.000,00	381.985.870,00	98,70	1.371.343.300,00
184					#DIV/0!	
185	BELANJA TIDAK TERDUGA				#DIV/0!	
186	Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
187	Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
188	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	#DIV/0!	-
189					#DIV/0!	

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
190	BELANJA TRANSFER				#DIV/0!	
191	Belanja Bagi Hasil		-	-	#DIV/0!	-
192	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	#DIV/0!	-
193	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	#DIV/0!	-
194	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	#DIV/0!	-
195	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	#DIV/0!	-
196	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	#DIV/0!	-
197	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	#DIV/0!	-
198	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	#DIV/0!	-
199	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota		-	-	#DIV/0!	-
200	Jumlah Belanja Transfer		-	-	#DIV/0!	-
202	JUMLAH BELANJA DAERAH		47.185.007.000,00	46.391.178.837,00	98,32	62.366.955.709,00
204	SURPLUS/DEFISIT		(47.185.007.000,00)	(46.391.178.837,00)	98,32	(62.366.955.709,00)
205	PEMBIAYAAN DAERAH				#DIV/0!	
206	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				#DIV/0!	
207	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	#DIV/0!	-
209	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-	#DIV/0!	-
210	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-	#DIV/0!	-
211	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-	#DIV/0!	-
212	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
213	Penghematan Belanja		-	-	#DIV/0!	-
214	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Tersesalkan		-	-	#DIV/0!	-
215	Sisa Dana Akrut Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Peneluaran Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
216	Sisa Belanja Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
217	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		-	-	#DIV/0!	-
218	Pencairan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
219	Pencairan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
220	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	#DIV/0!	-
221	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	#DIV/0!	-
222	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	#DIV/0!	-
223	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
224	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
225	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
226	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
227	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
228	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
229	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
230	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
231	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
232	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
233	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
234	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-	#DIV/0!	-
235	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
236	Penerimaan Kembali Dana Berputar kepada BLUD		-	-	#DIV/0!	-
237	Penerimaan Pembayaran Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	#DIV/0!	-
238	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
239	Divestasi BLUD		-	-	#DIV/0!	-
240	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-	#DIV/0!	-
241	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat		-	-	#DIV/0!	-
242	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
244	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				#DIV/0!	
245	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
246	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	#DIV/0!	-
247	Penyertaan Modal Daerah		-	-	#DIV/0!	-
248	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	#DIV/0!	-
249	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	#DIV/0!	-
250	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	#DIV/0!	-
251	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
252	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	#DIV/0!	-
253	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	#DIV/0!	-
254	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	#DIV/0!	-
255	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
256	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	#DIV/0!	-
257	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	#DIV/0!	-
258	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	#DIV/0!	-
259	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-	#DIV/0!	-
260	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-	#DIV/0!	-
261	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-	#DIV/0!	-
262	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-	#DIV/0!	-
263	Pemberian Pinjaman-Dana Berputar kepada BLUD		-	-	#DIV/0!	-
264	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	#DIV/0!	-
265	Pinjaman BLUD		-	-	#DIV/0!	-
266	Investasi BLUD		-	-	#DIV/0!	-
267	Pembentukan Dana Abadi Daerah		-	-	#DIV/0!	-
268	Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-	#DIV/0!	-
269	Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-	#DIV/0!	-
270	Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat		-	-	#DIV/0!	-
271	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	#DIV/0!	-
272	PEMBIAYAAN NETTO				#DIV/0!	
274						
275	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(47.185.007.000,00)	(46.391.178.837,00)	98,32	(62.366.955.709,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA KOMPARATIF
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas		-	-
4	Kas di Kas Daerah		-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
7	Kas di BLUD		-	-
8	Kas Dana BOS		-	-
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
10	Kas Lainnya		-	-
11	Setara Kas		-	-
12	Kas Dana BOSP		-	-
13	Kas Dana Abadi Daerah		-	-
14	Investasi Jangka Pendek		-	-
15	Investasi dalam Saham		-	-
16	Investasi dalam Deposito		-	-
17	Investasi dalam SUN		-	-
18	Investasi dalam SBI		-	-
19	Investasi dalam SPN		-	-
20	Investasi Jangka Pendek BLUD		-	-
21	Piutang Pajak Daerah		-	-
22	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
23	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		-	-
24	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-
25	Piutang Pajak Air Permukaan		-	-
26	Piutang Pajak Rokok		-	-
27	Piutang Pajak Alat Berat		-	-
28	Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)		-	-
29	Piutang Retribusi Daerah		-	-
30	Piutang Retribusi Jasa Umum		-	-
31	Piutang Retribusi Jasa Usaha		-	-
32	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		-	-
33	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
34	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-
35	Piutang Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-
36	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)		-	-
37	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
38	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
39	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
40	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
41	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	-
42	Piutang Jasa Giro		-	-
43	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
44	Piutang Pendapatan Bunga		-	-
45	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-
46	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-
47	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		-	-
48	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-
49	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-
50	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-
51	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-
52	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		-	-
53	Piutang Pendapatan BLUD		-	-
54	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
55	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-
56	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
57	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-
58	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-
59	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		-	-
60	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		-	-
61	Piutang Pungutan bagi Wisatawan Asing		-	-
62	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah		-	-
63	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan		-	-
64	Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah		-	-
65	Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah		-	-

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
66	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
67	Piutang Dana Perimbangan		-	-
68	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		-	-
69	Piutang Insentif Fiskal		-	-
70	Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
71	Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
72	Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-
73	Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
74	Piutang Bagi Hasil		-	-
75	Piutang Bantuan Keuangan		-	-
76	Piutang Lainnya		-	-
77	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		-	-
78	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		-	-
79	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
80	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
81	Uang Muka		-	-
82	Penyisihan Piutang		-	-
83	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
84	Penyisihan Piutang Lainnya		-	-
85	Beban Dibayar Dimuka		107.581.359,87	99.783.319,46
86	Beban Dibayar Dimuka		-	-
87	Beban Dibayar Dimuka-Sewa		-	-
88	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah		107.581.359,87	99.783.319,46
89	Persediaan		3.479.000,00	1.384.400,00
90	Barang Pakai Habis		3.479.000,00	1.384.400,00
91	Barang Tak Habis Pakai		-	-
92	Barang Bekas Dipakai		-	-
93			-	-
94	JUMLAH ASET LANCAR		111.060.359,87	101.167.719,46
95				
96	INVESTASI JANGKA PANJANG			
97	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
98	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-
99	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
100	Investasi dalam Obligasi		-	-
101	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
102	Dana Bergulir		-	-
103	Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
104	Penyertaan Modal		-	-
105	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
106	Investasi Dana Abadi Daerah		-	-
107			-	-
108	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-
109				
110	ASET TETAP			
111	Tanah		17.413.941.740,00	17.413.941.740,00
112	Tanah		17.413.941.740,00	17.413.941.740,00
113	Peralatan dan Mesin		11.302.212.320,00	11.083.012.320,00
114	Alat Besar		575.080.900,00	575.080.900,00
115	Alat Angkutan		4.042.985.783,00	4.042.985.783,00
116	Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-
117	Alat Pertanian		-	-
118	Alat Kantor dan Rumah Tangga		3.396.028.520,00	3.261.328.520,00
119	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		1.060.974.537,00	1.060.974.537,00
120	Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-
121	Alat Laboratorium		-	-
122	Alat Persenjataan		-	-
123	Komputer		2.117.217.580,00	2.032.717.580,00
124	Alat Eksplorasi		-	-
125	Alat Pengeboran		-	-
126	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-
127	Alat Bantu Eksplorasi		-	-
128	Alat Keselamatan Kerja		-	-
129	Alat Peraga		99.825.000,00	99.825.000,00
130	Peralatan Proses/Produksi		-	-
131	Rambu-rambu		-	-
132	Peralatan Olahraga		10.100.000,00	10.100.000,00
133	Gedung dan Bangunan		10.620.119.060,00	10.620.119.060,00
134	Bangunan Gedung		10.620.119.060,00	10.620.119.060,00
135	Monumen		-	-
136	Bangunan Menara		-	-
137	Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-
138	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		39.142.400,00	39.142.400,00
139	Jalan dan Jembatan		-	-
140	Bangunan Air		-	-
141	Instalasi		39.142.400,00	39.142.400,00
142	Jaringan		-	-
143	Aset Tetap Lainnya		151.172.400,00	151.172.400,00
144	Bahan Perpustakaan		151.002.400,00	151.002.400,00
145	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		170.000,00	170.000,00
146	Hewan		-	-
147	Biota Perairan		-	-
148	Tanaman		-	-
149	Barang Koleksi Non Budaya		-	-
150	Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
151	Konstruksi dalam Pengerjaan		710.423.000,00	710.423.000,00
152	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
153	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah		-	-
154	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin		-	-
155	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan		710.423.000,00	710.423.000,00
156	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
157	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya		-	-
158	Akumulasi Penyusutan		(13.392.015.109,90)	(12.673.035.514,14)
159	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(9.582.034.878,82)	(8.922.548.684,15)
160	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(3.808.920.124,41)	(3.750.405.283,32)
161	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(1.060.106,67)	(81.546,67)
162	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
163	Aset Konsesi Jasa		-	-
164	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi		-	-
165	Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra		-	-
166	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra		-	-
167	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		-	-
168	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi		-	-
169	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra		-	-
170				
171	JUMLAH ASET TETAP		26.844.995.810,10	27.344.775.405,86
172				
173	DANA CADANGAN			
174	Dana Cadangan			
175	Dana Cadangan		-	-
176	Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi		-	-
177	Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi		-	-
178	Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk		-	-
179	Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk		-	-
180				
181	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
182				
183	ASET LAINNYA			
184	Tagihan Jangka Panjang		-	-
185	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
186	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
187	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
188	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
189	Aset Tak Berwujud		1.391.045.490,00	1.189.065.520,00
190	Aset Tak Berwujud		1.391.045.490,00	1.189.065.520,00
191	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud			
192	Aset Lain-lain		-	1.192.992.110,00
193	Aset Lain-Lain		-	1.192.992.110,00
194	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(944.630.287,43)	(715.052.201,64)
195	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(944.630.287,43)	(715.052.201,64)
196	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-	(1.192.992.110,00)
197	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-	(1.192.992.110,00)
198	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		-	-
199	Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka		-	-
200	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		-	-
201	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		-	-
202				
203	JUMLAH ASET LAINNYA		446.415.202,57	474.013.318,36
204				
205	PROPERTI INVESTASI			
206	Properti Investasi Tanah		-	-
207	Properti Investasi Tanah		-	-
208	Properti Investasi Gedung dan Bangunan		-	-
209	Properti Investasi Gedung dan Bangunan		-	-
210	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi		-	-
211	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Gedung dan Bangunan		-	-
212	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		-	-
213	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan		-	-
214				
215	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		-	-
216				
217	JUMLAH ASET		27.402.471.372,54	27.919.956.443,68
218				
219	KEWAJIBAN			
220	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
221	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
222	Utang Taspen		-	-
223	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		-	-
224	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		-	-
225	Utang Iuran Jaminan Kematian		-	-
226	Utang PPh Pusat		-	-
227	Utang PPN Pusat		-	-
228	Utang Taperum		-	-
229	Utang Iuran Wajib Pegawai		-	-
230	Utang Pihak Ketiga Lainnya		-	-

NO	URAIAN	REF	2025	2024
231	Utang Bunga		-	-
232	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		-	-
233	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-
234	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
235	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
236	Utang Bunga kepada Masyarakat		-	-
237	Utang Bunga melalui BLUD		-	-
238	Utang Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah		-	-
239	Utang Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah		-	-
240	Utang Imbalan Pembiayaan Utang Daerah-Sukuk Daerah		-	-
241	Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
242	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		-	-
243	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
244	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
245	Utang Pinjaman BLUD		-	-
246	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah		-	-
247	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
248	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		-	-
249	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank		-	-
250	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
251	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		-	-
252	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek melalui BLUD		-	-
253	Bagian Lancar Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah		-	-
254	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
255	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		-	-
256	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		-	-
257	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		-	-
258	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa		-	-
259	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah		-	-
260	Utang Belanja		-	-
261	Utang Belanja Pegawai		-	-
262	Utang Belanja Barang dan Jasa		-	-
263	Utang Belanja Bunga		-	-
264	Utang Belanja Subsidi		-	-
265	Utang Belanja Hibah		-	-
266	Utang Belanja Modal Tanah		-	-
267	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-
268	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-
269	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
270	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-
271	Utang Belanja Tidak Terduga		-	-
272	Utang Belanja Bagi Hasil		-	-
273	Utang Belanja Bantuan Keuangan		-	-
274	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		-	-
275	Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-
276	Utang Belanja Bantuan Sosial		-	-
277	Utang Belanja Imbalan		-	-
278	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
279	Utang Kelebihan Pembayaran PAD		-	-
280	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		-	-
281	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-
282	Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
283				
284	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
285				
286	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
287	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
288	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
289	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		-	-
290	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
291	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
292	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN		-	-
293	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD		-	-
294	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta		-	-
295	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
296	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN		-	-
297	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD		-	-
298	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta		-	-
299	Utang kepada Masyarakat		-	-
300	Obligasi		-	-
301	Kewajiban Konsesi Jasa		-	-
302	Kewajiban Konsesi Jasa		-	-
303	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari		-	-
304	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah		-	-
305	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruskanpinjamkan kepada P		-	-
306	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibahyang		-	-

NO	URAIAN	REF	2025	2024
307	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dar		-	-
308	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah da		-	-
309	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerahdari		-	-
310	Utang Pinjaman Daerah dari LKB		-	-
311	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dar		-	-
312	Utang Pinjaman Daerah dari LKBB		-	-
313				
314	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
315				
316	JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
317				
318	EKUITAS			
319	EKUITAS		(18.988.707.464,46)	(34.446.999.265,32)
320	Ekuitas		28.068.373.539,70	27.461.373.307,84
321	Surplus/Defisit-LO		(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)
322	Ekuitas SAL		-	-
323	Estimasi Pendapatan		-	-
324	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		-	-
325	Apropriasi Belanja		-	-
326	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		-	-
327	Estimasi Perubahan SAL		-	-
328	Surplus/Defisit-LRA		-	-
329	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		46.391.178.837,00	62.366.955.709,00
330	RK PPKD		46.391.178.837,00	62.366.955.709,00
331				
332	JUMLAH EKUITAS		27.402.471.372,54	27.919.956.443,68
333				
334	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		27.402.471.372,54	27.919.956.443,68

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DISPERAKM
BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT
NIP. 19691012 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	REF	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO		-	-	-	#DIV/0!
7	Pajak Air Permukiman - LO		-	-	-	#DIV/0!
8	Pajak Rokok - LO		-	-	-	#DIV/0!
9	Pajak Mal Borak-LO		-	-	-	#DIV/0!
10	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MPLB)-LO		-	-	-	#DIV/0!
11	Retribusi Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
12	Retribusi Jasa Umum - LO		-	-	-	#DIV/0!
13	Retribusi Jasa Usaha - LO		-	-	-	#DIV/0!
14	Retribusi Perizinan Tertentu - LO		-	-	-	#DIV/0!
15	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO		-	-	-	#DIV/0!
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO		-	-	-	#DIV/0!
18	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO		-	-	-	#DIV/0!
19	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		-	-	-	#DIV/0!
20	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
21	Hasil Sotah Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
22	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
23	Hasil Kerja Sama Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
24	Jasa Giro - LO		-	-	-	#DIV/0!
25	Hasil Pengolahan Dana Bergulir - LO		-	-	-	#DIV/0!
26	Pendapatan Bunga - LO		-	-	-	#DIV/0!
27	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugian Keuangan Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
28	Penerimaan Komisi, Polongan, atau Bentuk Lain - LO		-	-	-	#DIV/0!
29	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO		-	-	-	#DIV/0!
30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		-	-	-	#DIV/0!
31	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
32	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
33	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		-	-	-	#DIV/0!
34	Pendapatan dari Pengembalian LO		-	-	-	#DIV/0!
35	Pendapatan BLUD - LO		-	-	-	#DIV/0!
36	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	#DIV/0!
37	Pendapatan Dana Kapitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO		-	-	-	#DIV/0!
38	Pendapatan Hasil Pengolahan Dana Bergulir - LO		-	-	-	#DIV/0!
39	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO		-	-	-	#DIV/0!
40	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
41	Pendapatan Zakat - LO		-	-	-	#DIV/0!
42	Pendapatan Hasil Pelaksanaan PerjanjianKontrak-LO		-	-	-	#DIV/0!
43	Pendapatan Konsesi Jasa		-	-	-	#DIV/0!
44	Pungutan bagi Wisatawan Asing-LO		-	-	-	#DIV/0!
45	Hasil Pengolahan Dana Cadangan-LO		-	-	-	#DIV/0!
46	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-LO		-	-	-	#DIV/0!
47	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-LO		-	-	-	#DIV/0!
48	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		-	-	-	#DIV/0!
49						
50	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
51	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	#DIV/0!
52	Dana Pembiangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
53	Dana Insentif Daerah (DID)- LO		-	-	-	#DIV/0!
54	Insentif Fisikal-LO		-	-	-	#DIV/0!
55	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		-	-	-	#DIV/0!
56	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		-	-	-	#DIV/0!
57	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO		-	-	-	#DIV/0!
58	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO		-	-	-	#DIV/0!
59	Pendapatan Bagi Hasil- LO		-	-	-	#DIV/0!
60	Bantuan Keuangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
61						
62	Jumlah Pendapatan Transfer - LO		-	-	-	#DIV/0!
63						
64	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO					
65	Pendapatan Hibah- LO		-	-	-	#DIV/0!
66	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	#DIV/0!
67	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO		-	-	-	#DIV/0!
68	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO		-	-	-	#DIV/0!
69	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga Organisasi Dalam Negeri/luar Negeri- LO		-	-	-	#DIV/0!
70	Sumbangan Pihak Ketiga/Seyanis- LO		-	-	-	#DIV/0!
71	Dana Darurat- LO		-	-	-	#DIV/0!
72	Dana Darurat- LO		-	-	-	#DIV/0!
73	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO		-	-	-	#DIV/0!
74	Lain-lain Pendapatan- LO		-	-	-	#DIV/0!
75	Pendapatan Dana Kapitas JKN pada FKTP-LO		-	-	-	#DIV/0!
76	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-LO		-	-	-	#DIV/0!
77	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat- LO		-	-	-	#DIV/0!
78	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi-LO		-	-	-	#DIV/0!
79	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi- LO		-	-	-	#DIV/0!
80	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO		-	-	-	#DIV/0!
81						
82	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH - LO		-	-	-	#DIV/0!
83						
84	BEBAN					
85	BEBAN OPERASIONAL					
86	Beban Pegawai		12.698.936.072,00	13.003.409.204,00	(304.473.132,00)	(6,85)
87	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		5.665.625.944,00	5.648.705.720,00	17.220.224,00	0,30
88	Beban Tambahan Penghasilan ASN		7.033.009.128,00	7.516.943.484,00	(483.934.356,00)	(6,84)
89	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	437.760.000,00	(437.760.000,00)	(100,00)
90	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	#DIV/0!
91	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	#DIV/0!
92	beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KUH/WKUH		-	-	-	#DIV/0!
93	Beban Pegawai BOS		-	-	-	#DIV/0!
94	Beban Pegawai BOSP		-	-	-	#DIV/0!
95	Beban Pegawai BLUD		-	-	-	#DIV/0!
96	Beban Barang dan Jasa		15.437.081.155,59	17.124.385.483,27	(1.687.304.327,68)	(9,85)
97	Beban Barang		2.651.501.091,00	4.340.668.793,00	(1.689.167.702,00)	(38,91)
98	Beban Jasa		9.857.204.803,59	6.357.840.813,27	3.499.363.990,32	55,04
99	Beban Pemeliharaan		566.949.514,00	686.716.971,00	(119.767.057,00)	(17,44)
100	Beban Perjalanan Dinas		2.278.625.347,00	5.721.158.906,00	(3.442.533.559,00)	(80,17)
101	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		82.800.000,00	18.000.000,00	64.800.000,00	360,00
102	Beban Penunjang Otonomi Khusus		-	-	-	#DIV/0!
103	Beban Barang dan Jasa BOS		-	-	-	#DIV/0!
104	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-	-	#DIV/0!
105	Beban Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	#DIV/0!
106	Beban Bunga		-	-	-	#DIV/0!
107	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	#DIV/0!
108	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	#DIV/0!
109	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	#DIV/0!
110	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	#DIV/0!
111	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	#DIV/0!
112	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	#DIV/0!
113	Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah		-	-	-	#DIV/0!
114	Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah		-	-	-	#DIV/0!

115	Beban Subsidi					#DIV/0!
116	Beban Subsidi kepada BUMN					#DIV/0!
117	Beban Subsidi kepada BUMD					#DIV/0!
118	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta					#DIV/0!
119	Beban Subsidi kepada Koperasi					#DIV/0!
120	Beban Hibah	224.089.999,00	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)		(84,54)
121	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat					#DIV/0!
122	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya					#DIV/0!
123	Beban Hibah kepada BUMN					#DIV/0!
124	Beban Hibah kepada BUMD					#DIV/0!
125	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	224.089.999,00	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)		(84,54)
126	Beban Hibah Dana BOS					#DIV/0!
127	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Pajal Politik					#DIV/0!
128	Beban Hibah Dana BOS*					#DIV/0!
129	Beban Hibah kepada BUMDesa					#DIV/0!
130	Beban Hibah kepada Koperasi					#DIV/0!
131	Beban Bantuan Sosial	17.500.000.000,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)		(36,78)
132	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	17.500.000.000,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)		(36,78)
133	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok					#DIV/0!
134	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					#DIV/0!
135	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					#DIV/0!
136	Beban Pembiayaan Pinjaman					#DIV/0!
137	Beban Pembiayaan Pinjaman Pajak Daerah					#DIV/0!
138	Beban Pembiayaan Pinjaman Retribusi Daerah					#DIV/0!
139	Beban Pembiayaan Pinjaman hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					#DIV/0!
140	Beban Pembiayaan Pinjaman Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					#DIV/0!
141	Beban Pembiayaan Pinjaman Transfer Pemerintah Pusat					#DIV/0!
142	Beban Pembiayaan Pinjaman Transfer Antar Daerah					#DIV/0!
143	Beban Pembiayaan Pinjaman Lainnya					#DIV/0!
144	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.096.974.777,57	980.744.251,89	116.230.525,68		11,85
145	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	659.486.194,87	577.007.714,85	82.478.480,02		14,20
146	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	206.931.837,11	211.829.315,38	(4.897.578,27)		(2,31)
147	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Jaringan	978.560,00	81.546,67	897.013,33		1.100,00
148	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya					#DIV/0!
149	Beban Penyusutan Aset Lainnya					#DIV/0!
150	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	229.578.085,79	191.825.074,19	37.753.011,60		19,58
151	Beban Penyusutan Aset Lainnya Aset Lain-Lain					#DIV/0!
152	Beban Penyusutan Aset Korosi Jeda					#DIV/0!
153	Beban Penyusutan Properti Investasi					#DIV/0!
154	Beban Imbalan					#DIV/0!
155	Beban Imbalan Sukuik Daerah					#DIV/0!
156	Jumlah Beban Operasional	47.057.081.004,16	61.908.372.573,16	(14.851.291.569,00)		(23,99)
157	BEBAN TRANSFER					
158	Beban Bagi Hasil					#DIV/0!
159	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa					#DIV/0!
160	Beban Bantuan Keuangan					#DIV/0!
161	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi					#DIV/0!
162	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota					#DIV/0!
163	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota					#DIV/0!
164	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi					#DIV/0!
165	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					#DIV/0!
166	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota					#DIV/0!
167	Jumlah Beban Transfer					#DIV/0!
168	JUMLAH BEBAN	47.057.081.004,16	61.908.372.573,16	(14.851.291.569,00)		(23,99)
169	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)	14.851.291.569,00		(23,99)
170	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
171	SURPLUS NON OPERASIONAL					
172	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LQ					#DIV/0!
173	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LQ					#DIV/0!
174	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LQ					#DIV/0!
175	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LQ					#DIV/0!
176	Surplus Penyusutan Kewajiban Jangka Panjang-LQ					#DIV/0!
177	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LQ					#DIV/0!
178	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LQ					#DIV/0!
179	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LQ					#DIV/0!
180	Surplus Penyelesaian Premi (Diskonto) Obligasi-LQ					#DIV/0!
181	Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah					#DIV/0!
182	Surplus Penyelesaian Obligasi Daerah					#DIV/0!
183	Surplus Penyelesaian Sukuik Daerah					#DIV/0!
184	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LQ					#DIV/0!
185	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LQ					#DIV/0!
186	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LQ					#DIV/0!
187	Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi					#DIV/0!
188	Jumlah Surplus Non Operasional					#DIV/0!
189	DEFISIT NON OPERASIONAL					
190	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LQ					#DIV/0!
191	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LQ					#DIV/0!
192	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LQ					#DIV/0!
193	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LQ					#DIV/0!
194	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LQ					#DIV/0!
195	Defisit Penyusutan Kewajiban Jangka Panjang-LQ					#DIV/0!
196	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LQ					#DIV/0!
197	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LQ					#DIV/0!
198	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LQ					#DIV/0!
199	Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah					#DIV/0!
200	Defisit Penyelesaian Obligasi Daerah					#DIV/0!
201	Defisit Penyelesaian Sukuik Daerah					#DIV/0!
202	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LQ					#DIV/0!
203	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LQ					#DIV/0!
204	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LQ					#DIV/0!
205	Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi					#DIV/0!
206	Jumlah Defisit Non Operasional					#DIV/0!
207	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					#DIV/0!
208	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)	14.851.291.569,00		(23,99)
209	POS LUAR BIASA					
210	BEBAN LUAR BIASA					
211	Beban Luar Biasa					#DIV/0!
212	Beban Tidak Terduga					#DIV/0!
213	Beban Luar Biasa Lainnya					#DIV/0!
214	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA					#DIV/0!
215	JUMLAH POS LUAR BIASA					#DIV/0!
216	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)	14.851.291.569,00		(23,99)

* Data Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

NO	URAIAN	2025	2024
1	Ekuitas Awal	27.919.956.443,68	27.447.242.807,87
2	Surplus/Defisit-LO	(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)
3	RK PPKD	46.391.178.837,00	62.366.955.709,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	148.417.096,02	14.130.499,97
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang		
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen		
4.7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Permanen		
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	(393.792.937,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	9.110.018.060,00	16.040.000,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Aset Ekstrakomtable		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		(409.832.937,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	(9.110.018.060,00)	
4.9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	148.417.096,02	407.923.436,97
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(3.162.009.555,17)	(1.909.500,03)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	3.310.426.651,19	409.832.937,00
4.10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud		

	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Pemanfaatan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Pemanfaatan		
4.11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi		
4.12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Aset Lainnya		
4.13	Koreksi/Penyesuaian Properti Investasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Properti Investasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Properti Investasi dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Properti Investasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Properti Investasi dari Mutasi Antar SKPD		
4.14	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Properti Investasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Properti Investasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Properti Investasi		
4.15	Koreksi/Penyesuaian Utang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Pendapatan Diterima Dimuka		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Pendapatan Diterima Dimuka		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Utang Belanja Pegawai		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Utang Belanja Pegawai		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Utang Belanja Barang dan Jasa		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Utang Belanja Barang dan Jasa		
4.16	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain		
5	Ekuitas Akhir	27.402.471.372,54	27.919.956.443,68

Ekuitas Neraca	27.402.471.372,54	27.919.956.443,68
Difference	-	-

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DISPERAKIM

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT

NIP. 19691012 199803 1 003

DAFTAR ISI

I.	Kata Pengantar	
II.	Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	
III.	Laporan Realisasi Anggaran SKPD	
IV.	Neraca Komporatif SKPD	
V.	Laporan Operasional SKPD	
VI.	Laporan Perubahan Ekuitas SKPD	
VII.	Catatan Atas Laporan Keuangan	
Bab 1.	Pendahuluan.	
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	2
Bab 2.	Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	
2.1	Ekonomi Makro	3
2.2	Kebijakan Keuangan	3
Bab 3.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	5
3.2	Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	6
Bab 4.	Kebijakan Akuntansi	
4.1	Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	10
4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10
4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD	15

Bab 5.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	
5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
5.1.1	Pendapatan	16
5.1.2	Belanja	16
5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca	
5.2.1	Aset	33
5.2.2	Ekuitas	57
5.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	
5.3.1	Pendapatan	59
5.3.2	Beban	59
5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	67
 Bab 6.	 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	 69
 Bab 7.	 Penutup	 79
 Lampiran Tambahan		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan.

Dimana informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun kebijaksanaan yang dapat ditetapkan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai pendapatan Dinas dan belanja selama dalam satu periode.
2. Menyediakan informasi tentang Realisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai.

Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang sistematis dalam satu periode untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Manajemen
Membantu pengguna anggaran dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset kewajiban dan ekuitas dana.
3. Transparan
Memberikan informasi keuangan yang benar, jujur dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah yang dipercayakan kepada pengguna anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Akuntansi Elektronik.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900.1.1/0011108 tanggal 19 November 2025 Tentang Pedoman Penatausahaan APBD Akhir Tahun dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 adaah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran; kebijakan keuangan yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Arus Kas; serta keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD keseluruhan, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat sejarah singkat dinas, tugas pokok dan fungsi dan susunan organisasi dinas.

BAB VII PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

PENDAPATAN :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan dan Perubahan tidak ada anggaran pendapatan.

BELANJA :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan Anggaran Belanja Murni sebesar Rp. 52.928.992.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 52.742.542.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 186.450.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Pergeseran sebesar Rp. 49.121.484.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 48.940.484.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 181.000.000,- dan menjadi Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 47.185.007.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 46.798.007.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 387.000.000,- yang digunakan untuk program dinas yang bersifat rutin dan pembangunan, dengan jumlah program kegiatan sebanyak 8 program.

Adapun Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah meliputi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Program Pengembangan Perumahan.
3. Program Kawasan Permukiman.
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
7. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee.
8. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **“Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan

3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan DPA serta DPA Perubahan. Dalam mewujudkan Visi Gubernur pada periode perencanaan jangka menengah transisi 2024-2026 serta memantapkan eksistensi dan arah sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
4. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee.
7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Dalam pencapaian arah sasaran yang telah ditetapkan maka pelaksanaan program-program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan ditunjang oleh :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangana SKPD

PENDAPATAN :

Sumber Pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tidak Ada.

BELANJA :

Anggaran Belanja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 52.928.992.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 52.742.542.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. serta Belanja Modal sebesar Rp. 186.450.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Pergeseran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 49.121.484.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 48.940.484.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 181.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran Belanja Perubahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 47.185.007.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 46.798.007.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal sebesar Rp. 387.000.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja Operasi :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Operasi menganggarkan sebesar Rp.46.798.007.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.009.192.967,- dengan Presentasi 98.31 % terdiri dari Belanja Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 13.183.059.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 12.698.935.072,- dengan Presentasi 96.33 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 484.123.928; Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp. 15.789.948.000,- dan Realisasi sebesar Rp 15.486.167.896,- dengan Presentasi 98.08 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 303.780.104,- ; Belanja Hibah dengan Anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp 224.089.999,- dengan Presentasi 99.60% sehingga terdapat sisa anggaran

sebesar Rp. 910.001,- dan Belanja Bantuan Sosial dengan Anggaran sebesar Rp. 17.600.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 17.600.000.000,- dengan Presentasi 100% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,-.

Belanja Modal :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Modal menganggarkan sebesar Rp. 387.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 381.985.870,- dengan Presentasi 98.70 % yang terbagi dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Anggaran sebesar Rp. 222.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 219.200.000,- dengan Presentasi 98.74 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.800.000; dan Belanja Modal Aset Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 162.785.870,- dengan Presentasi 98.66 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.214.130,-.

Secara umum pencapaian target fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 98.32 %.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Hambatan atau Kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Kegiatan guna mencapai Kinerja yang telah ditetapkan, dengan adanya kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah. Dalam menghadapi kebijaksanaan tersebut , strategis yang diambil / dilaksanakan dengan mengevaluasi kembali target – target Pencapaian Kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah guna mengantisipasi adanya kebijaksanaan yang berdampak pada Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD							
TAHUN ANGGARAN 2025							
SKPD	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Fungsi	:						
Sub Fungsi	:						
Provinsi	:	Jawa Tengah					
NO	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN		JUMLAH	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96 %)
			ANGGARAN				
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu (%)	
1	2		3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH		47.185.007.000	46.391.178.837	793.828.163	98,32	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		18.601.937.000	17.966.434.984	635.502.016	96,58	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	886.683.000	846.836.274	39.846.726	95,51	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	582.312.000	547.684.522	34.627.478,00	94,05	Kegiatan telah dilaksanakan namun terdapat efisiensi belanja - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi infrastruktur bersama 6 OPD rumpun infras yg direncanakan dilaksanakan di 3 bakorwil hanya di laksanakan 1x di semarang oleh dinas PU PUSDATARU
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.371.000	299.151.752	5.219.248,00	98,29	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.646.863.000	13.138.713.576	508.149.424	96,28	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.183.059.000	12.698.935.072	484.123.928,00	96,33	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	418.354.000	395.211.904	23.142.096,00	94,47	Tidak terserapnya Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dikarenakan sesuai dengan kebutuhan (Honor KPA 1 orang sebanyak 10 bulan tidak terealisasi karena pensiun dan sisa pembulatan BPJS Tenaga Pendukung atau non ASN)
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.336.000	24.660.500	675.500,00	97,33	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.486.000	3.486.000	-	100,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13.302.000	13.204.200	97.800,00	99,26	
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.326.000	3.215.900	110.100,00	96,69	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	167.513.000	166.862.193	650.807	99,61	
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.510.000	5.508.300	1.700,00	99,97	
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	154.410.893	589.107,00	99,62	
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.823.000	3.763.000	60.000,00	98,43	
		Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.180.000	3.180.000	-	100,00	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.132.000	62.535.000	4.597.000	93,15229697	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.015.000	9.984.000	31.000,00	99,69	
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.271.000	11.216.000	55.000,00	99,51	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.170.000	32.659.000	4.511.000,00	87,86	Sisa pembayaran retribusi pelatihan dan kursus singkat (menyesuaikan pelaksanaan pelatihan dan kursus singkat)
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	726.000	726.000	-	100,00	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.950.000	7.950.000	-	100,00	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.247.119.000	1.182.173.494	64.945.506	94,79	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	32.026.000	31.871.000	155.000,00	99,52	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.315.000	28.315.000	-	100,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.810.000	12.810.000	-	100,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	265.000.000	264.900.000	100.000,00	99,96	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.534.000	11.534.000	-	100,00	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.330.000	3.000.000	330.000,00	90,09	Sisa langganan surat kabar dan majalah (sudah tidak berlangganan lagi sejak adanya efisiensi anggaran)

		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	17.550.000	17.525.000	25.000,00	99,86	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.543.000	497.467.090	63.075.910,00	88,75	Sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah dalam rangka fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (menyesuaikan undangan)
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.335.000	19.231.000	104.000,00	99,46	
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	296.676.000	295.520.404	1.155.596,00	99,61	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	222.000.000	219.200.000	2.800.000	98,74	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	222.000.000	219.200.000	2.800.000,00	98,74	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.770.019.000	1.761.420.533	8.598.467	99,51	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	147.962.000	147.938.572	23.428,00	99,98	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.057.000	396.316.414	6.740.586,00	98,33	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.000.000	1.217.165.547	1.834.453,00	99,85	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	594.608.000	588.693.914	5.914.086	99,01	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	45.187.514	4.812.486,00	90,38	Sisa pembayaran pajak kendaraan dan jasa servis kendaraan pejabat (sesuai tagihan pajak dan jasa servis)
		Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.450.000	199.349.400	1.100.600,00	99,45	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	12.810.000	12.810.000	-	100,00	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.418.000	57.418.000	-	100,00	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273.930.000	273.929.000	1.000,00	100,00	
II.		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	24.128.017.000	24.051.869.611	76.147.389	99,68	
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	158.803.000	158.539.784	263.216	99,83	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Program Provinsi	101.473.000	101.418.892	54.108,00	99,95	
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	57.330.000	57.120.892	209.108,00	99,64	
		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	59.141.000	58.865.908	275.092	99,53	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	32.840.000	32.599.284	240.716,00	99,27	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	26.301.000	26.266.624	34.376,00	99,87	
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	18.865.287.000	18.827.826.677	37.460.323	99,80	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.125.589.000	3.125.271.462	317.538,00	99,99	
		Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	15.739.698.000	15.702.555.215	37.142.785,00	99,76	
		Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	5.044.786.000	5.006.637.242	38.148.758	99,24	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	5.044.786.000	5.006.637.242	38.148.758,00	99,24	
III.		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.307.800.000	2.269.622.439	38.177.561	98,35	
		Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	46.951.000	46.807.100	143.900	99,69	
		Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	46.951.000	46.807.100	143.900,00	99,69	
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	2.260.849.000	2.222.815.339	38.033.661	98,32	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	523.257.000	523.206.028	50.972,00	99,99	
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	49.416.000	49.408.396	7.604,00	99,98	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	1.688.176.000	1.650.200.915	37.975.085,00	97,75	

IV.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	398.605.000	396.397.129	2.207.871	99,45	
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	398.605.000	396.397.129	2.207.871	99,45	
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	343.376.000	341.430.129	1.945.871,00	99,43	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	55.229.000	54.967.000	262.000,00	99,53	
V.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	246.991.000	246.934.370	56.630	99,98	
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	246.991.000	246.934.370	56.630	99,98	
	Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	246.991.000	246.934.370	56.630,00	99,98	
VI.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	411.546.000	371.335.000	40.211.000	90,23	
	Kegiatan Penyelesaian Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	411.546.000	371.335.000	40.211.000	90,23	
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	303.342.000	263.137.000	40.205.000,00	86,75	Salah Satu Pegawai Non ASN resign per 1 September 2025 sehingga Beban Honorarium Penyuluh Pendamping dan Beban Jaminan Kesehatan, Kematian serta Kecelakaan tidak terserap dan adanya Penyesuaian harga Pembayaran PNPB Sertipikat Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	108.204.000	108.198.000	6.000,00	99,99	
VII.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	330.853.000	330.801.880	51.120	99,98	
	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	330.853.000	330.801.880	51.120	99,98	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota	38.928.000	38.928.000	-	100,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	291.925.000	291.873.880	51.120,00	99,98	
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	116.447.000	115.437.000	1.010.000	99,13	
	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	116.447.000	115.437.000	1.010.000	99,13	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Kualifikasi Menengah	116.447.000	115.437.000	1.010.000,00	99,13	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	642.811.000	642.346.424	464.576	99,93	
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha	642.811.000	642.346.424	464.576	99,93	
	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	162.515.000	162.367.080	147.920,00	99,91	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	480.296.000	479.979.344	316.656,00	99,93	
	JUMLAH	47.185.007.000	46.391.178.837	793.828.163	98,32	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

Tujuan Kebijakan Akutansi adalah mengatur penyajian keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas akutansi. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Yang dimaksud pengguna adalah masyarakat, legislative, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman Pemerintah.

4.1. ENTITAS AKUTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akutansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda, sedangkan entitas Akutansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akutansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akutansi adalah SKPD dan PPKD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. BASIS AKUTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akutansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah Basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca (*basis cash forward to accrual*).

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD.

4.3.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

4.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca.

4.3.4. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.3.5. Piutang

- Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- Piutang diakui pada akhir periode ketika akan disusun Neraca sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Kemudian dijurnal balik pada awal berikutnya, dan pada saat realisasi penerimaan pendapatan diakui sebagai pendapatan.

4.3.6. Persediaan

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil investasi fisik (*stock opname*).
- Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan harga pembelian yang terakhir.

4.3.7. Aset Tetap

- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud memenuhi kriteria :
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya dapat distribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

- c. Kegiatan Pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal.
- d. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam suatu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
- e. Suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan aset tetap (pengadaan aset tetap dalam rangka menunjang pelaksanaan suatu kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
- f. Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak pemilikan aset tersebut.
- g. Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- h. Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.

4.3.8. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sama dengan digunakan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

4.3.9. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai.

Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap digunakan.

Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya.

Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya. Mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

4.3.10. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

4.3.12. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi, perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

4.3.13. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan dan apabila telah selesai dibangun dan diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

4.3.14. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan cadangan.

Aset lainnya terdiri dari :

- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Kemitraan dengan pihak ketiga;
- Aset lain-lain.

4.3.15. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

4.3.16. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.17. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas dana diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dan investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode

4.3.18. Koreksi Kesalahan

a. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;

c. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;

d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas dana yang terkait;

e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain;

f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar;

- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- h. Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian laporan keuangan.

4.3.19. Pendapatan

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

4.3.20. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawab atas pengeluaran tersebut.

4.3.21. Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SILPA.
- b. Akutansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- c. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- d. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto;
- d. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH

Kebijakan akutansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengakuan, pengukuran, pengajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standart Akutansi Pemerintah dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 12 September 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2025, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH Rp,00

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Pendapatan Asli daerah					
2 Pendapatan Transfer					
3 Lain-Lain Pendapatan yang sah					
Jumlah					

5.1.2 BELANJA DAERAH Rp 46.391.178.837,00

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp, 47.185.007.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 46.391.178.837,00 atau 98.32 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 62.366.955.709,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar (Rp, 15.975.776.872,00) atau (25.62 %) dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Operasional	46.798.007.000,00	46.009.192.967,00	98,31	60.995.612.409,00	(14.986.419.442,00)	(24,57)
2 Belanja Modal	387.000.000,00	381.985.870,00	98,70	1.371.343.300,00	(989.357.430,00)	(72,15)
3 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
Jumlah	47.185.007.000,00	46.391.178.837,00	98,32	62.366.955.709,00	(15.975.776.872,00)	(25,62)

Belanja Daerah **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL Rp 46.009.192.967,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp, 46.798.007.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 46.009.192.967,00 atau 98.31 % apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 60.995.612.409,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar (Rp, 14.986.419.442,00) atau (24.57 %) dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran			Kenaikan/Penurunan		
		Setelah	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	(Rp)	%
		Perubahan (Rp)					
1	Belanja Pegawai	13.183.059.000,00	12.698.935.072,00	96,33	13.603.409.204,00	(904.474.132,00)	(6,65)
2	Belanja Barang dan Jasa	15.789.948.000,00	15.486.167.896,00	98,08	17.192.369.571,00	(1.706.201.675,00)	(9,92)
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	225.000.000,00	224.089.999,00	99,60	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)	(84,54)
6	Belanja Bantuan Sosial	17.600.000.000,00	17.600.000.000,00	100,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)	(38,78)
Jumlah		46.798.007.000,00	46.009.192.967,00	98,31	60.995.612.409,00	(14.986.419.442,00)	(24,57)

Belanja Operasional **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp 12.698.935.072,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp, 13.183.059.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 12.698.935.072,00 atau 96.33 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 13.603.409.204,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar (Rp, 904.474.132,00) atau (6.65 %) dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.891.559.000,00	5.665.925.944,00	96,17	5.648.705.720,00	17.220.224,00	0,30
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.291.500.000,00	7.033.009.128,00	96,45	7.516.943.484,00	(483.934.356,00)	(6,44)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	437.760.000,00	(437.760.000,00)	(100,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Penerimaan Lainnya	-	-	-	-	-	-

	Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH						
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai BOSP	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13.183.059.000,00	12.698.935.072,00	96,33	13.603.409.204,00	(904.474.132,00)	(6,65)

Belanja Pegawai **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp 5.665.925.944,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp, 5.891.559.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 5.665.925.944,00 atau 96.17%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 5.648.705.720,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp, 17.220.224,00 atau 0.30 % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurun an (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	4.274.898.000,00	4.251.320.762,00	99,45	4.240.433.700,00	10.887.062,00	0,26
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	375.500.000,00	363.128.502,00	96,71	368.682.454,00	(5.553.952,00)	(1,51)
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	187.880.000,00	180.320.000,00	95,98	198.500.000,00	(18.180.000,00)	(9,16)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	160.325.000,00	127.675.000,00	79,64	90.870.000,00	36.805.000,00	40,50
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	103.300.000,00	89.240.000,00	86,39	110.620.000,00	(21.380.000,00)	(19,33)
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	213.000.000,00	206.565.980,00	96,98	207.700.560,00	(1.134.580,00)	(0,55)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	131.800.000,00	50.112.128,00	38,02	24.047.931,00	26.064.197,00	108,38
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	120.000,00	60.282,00	50,24	59.735,00	547,00	0,92
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	372.500.000,00	362.673.349,00	97,36	373.241.392,00	(10.568.043,00)	(2,83)
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.500.000,00	8.707.438,00	91,66	8.637.429,00	70.009,00	0,81

	Belanja Iuran						
11	Jaminan Kematian ASN	27.000.000,00	26.122.503,00	96,75	25.912.519,00	209.984,00	0,81
	Belanja Iuran Simpanan Peserta						
12	Tabungan	35.736.000,00	-	-	-	-	-
	Perumahan Rakyat ASN						
	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-
13	Belanja Tunjangan Khusus*)	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Zakat ASN	-	-	-	-	-	-
15							
	Jumlah	5.891.559.000,00	5.665.925.944,00	96,17	5.648.705.720,00	17.220.224,00	0,30

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp 7.033.009.128,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp, 7.291.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 7.033.009.128,00 atau 96.45 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 7.516.943.484,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp, 483.934.356,00 atau 6.44 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.291.500.000,00	7.033.009.128,00	96,45	7.516.943.484,00	(483.934.356,00)	(6,44)
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
4 Tambahan Penghasilan berdasarkan KelangkaanProfesi ASN	-	-	-	-	-	-
5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi KerjaASN	-	-	-	-	-	-
6 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	-	-
Jumlah	7.291.500.000,00	7.033.009.128,00	96,45	7.516.943.484,00	(483.934.356,00)	(6,44)

Belanja Tambahan Penghasilan ASN **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

**5.1.2.1.1.3 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Rp 0**

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp, 0 dengan realisasi sebesar Rp, 0 atau 0 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 437.760.000,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar (Rp, 437.760.000,00) atau (100 %) dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Honorarium	-	-	-	437.760.000,00	(437.760.000,00)	-
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	-	-	-	-	-	-
10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	437.760.000,00	(437.760.000,00)	(100,00)

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1.2 **Belanja Barang dan Jasa Rp 15.486.167.896,00**

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp, 15.789.948.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 15.486.167.896,00 atau 98.08 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 17.192.369.571,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 1.706.201.675,00) atau (9.92) % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Barang	2.701.040.000,00	2.653.595.691,00	98,24	4.341.255.193,00	(1.687.659.502,00)	(38,87)
2 Belanja Jasa	10.064.090.000,00	9.904.196.944,00	98,41	6.425.238.501,00	3.478.958.443,00	54,15
3 Belanja Pemeliharaan	570.258.000,00	566.949.914,00	99,42	686.716.971,00	(119.767.057,00)	(17,44)
4 Belanja Perjalanan Dinas	2.354.960.000,00	2.278.625.347,00	96,76	5.721.158.906,00	(3.442.533.559,00)	(60,17)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99.600.000,00	82.800.000,00	83,13	18.000.000,00	64.800.000,00	360,00
6 Belanja Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-
8 Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	15.789.948.000,00	15.486.167.896,00	98,08	17.192.369.571,00	(1.706.201.675,00)	(9,92)

Belanja Barang dan Jasa **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1.2.1 **Belanja Barang Rp 2.653.595.691,00**

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp, 2.701.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 2.653.595.691,00 atau 98,24 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 4.341.255.193,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 1.687.659.502,00) atau (38.87) % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Barang Habis Pakai	2.701.040.000,00	2.653.595.691,00	98,24	4.341.255.193,00	(1.687.659.502,00)	(38,87)
2 Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	-	-	-	-
	2.701.040.000,00	2.653.595.691,00	98,24	4.341.255.193,00	(1.687.659.502,00)	(38,87)

Belanja Barang **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1.2.2 **Belanja Jasa Rp 9.904.196.944,00**

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp, 10.064.090.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 9.904.196.944,00 atau 98.41 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 6.425.238.501,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp 3.478.958.443,00 atau 54.15 % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penuruna n (Rp)	%
1	Belanja Jasa Kantor	5.699.676.000,00	5.554.861.326,00	97,46	5.202.407.992,00	352.453.334,00	6,77
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	303.299.000,00	297.987.828,00	98,25	252.087.879,00	45.899.949,00	18,21
3	Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	16.500.000,00	(16.500.000,00)	(100,00)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	115.000.000,00	114.384.000,00	99,46	84.690.000,00	29.694.000,00	35,06
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	258.728.000,00	256.160.250,00	99,01	463.894.530,00	(207.734.280,00)	(44,78)
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.656.217.000,00	3.653.853.540,00	99,94	366.493.100,00	3.287.360.440,00	896,98
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS/PPPK	31.170.000,00	26.950.000,00	86,46	39.165.000,00	(12.215.000,00)	(31,19)
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-

	Belanja Jasa						
	Insentif bagi						
	Pegawai Non						
14	ASN atas	-	-	-	-	-	-
	Pemungutan						
	Retribusi						
	Daerah						
	Belanja Sewa						
15	Aset Tidak	-	-	-	-	-	-
	Berwujud						
	Jumlah	10.064.090.000,00	9.904.196.944,00	98,41	6.425.238.501,00	3.478.958.443,00	54,15

Belanja Jasa **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan Rp 566.949.914,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp, 570.258.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 566.949.914,00 atau 99.42 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 686.716.971,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 119.767.057,00) atau (17.44) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran					
		Setelah	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
		Perubahan				(Rp)	
		(Rp)					
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	340.633.000,00	337.325.914,00	99,03	436.716.971,00	(99.391.057,00)	(22,76)
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	229.625.000,00	229.624.000,00	100,00	250.000.000,00	(20.376.000,00)	(8,15)
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	570.258.000,00	566.949.914,00	99,42	686.716.971,00	(119.767.057,00)	(17,44)

Belanja Pemeliharaan **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Rp 2.278.625.347,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp, 2.354.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 2.278.625.347,00 atau 96.76 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 5.721.158.906,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 3.442.533.559,00) atau (60.17) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran			Kenaikan/Penurun		
		Setelah	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	an (Rp)	%
		Perubahan (Rp)					
1	Belanja						
	Perjalanan						
	Dinas	2.354.960.000,00	2.278.625.347,00	96,76	5.471.158.906,00	(3.192.533.559,00)	(58,35)
2	Dalam						
	Negeri						
	Belanja						
	Perjalanan						
	Dinas Luar	-	-	-	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
	Negeri						
Jumlah		2.354.960.000,00	2.278.625.347,00	96,76	5.721.158.906,00	(3.442.533.559,00)	(60,17)

Belanja Perjalanan Dinas **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp, 82.800.000,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp, 99.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 82.800.000,00 atau 83.13 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 18.000.000,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 64.800.000,00 atau 360 % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran					
		Setelah	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penur	%
		Perubahan				unan (Rp)	
		(Rp)					
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	99.600.000,00	82.800.000,00	83,13	-	82.800.000,00	-
	Jumlah	99.600.000,00	82.800.000,00	83,13	18.000.000,00	64.800.000,00	360,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat **tidak mencapai target*** dikarenakan : Penyesuaian biaya PNPB Tahun 2025 dari Badan Pertanahan Nasional dari semua Rp 315.000 menjadi Rp 245.000 /bidang tanah (ketentuan dari Kantor BPN).

5.1.2.1.5 Belanja Hibah Rp 224.089.999,00

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp, 225.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 224.089.999,00 atau 99.60 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.449.833.634,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 1.225.743.635,00) atau (84.54) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	(1.225.743.635,00)	-
3	Belanja Hibah kepada BUMN	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah kepada BUMD	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	225.000.000,00	224.089.999,00	99,60	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)	(84,54)
6	Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Hibah Dana BOSP	-	-	-	-	-	-
Jumlah		225.000.000,00	224.089.999,00	99,60	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)	(84,54)

Belanja Hibah **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1.5.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp 224.089.999,00

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp, 225.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 224.089.999,00 atau 99.60 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.449.833.634,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 1.225.743.635,00) atau (84.54) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan	-	-	-	-	-	-

	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan terdaftar						
2		-	-	-	-	-	-
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000,00	224.089.999,00	99,595555	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)	(84,54)
4	Belanja Hibah kepada Koperasi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	225.000.000,00	224.089.999,00	99,60	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)	(84,54)

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia **tidak mencapai target*** dikarenakan : -

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial Rp 17.600.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp, 17.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 17.600.000.000,00 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 28.750.000.000,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 11.150.000.000,00) atau (38.78) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	17.600.000.000,00	17.600.000.000,00	100,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)	(38,78)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	17.600.000.000,00	17.600.000.000,00	100,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)	(38,78)

Belanja Bantuan Sosial **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.1.6.1 **Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Rp 17.600.000.000,00**

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dianggarkan sebesar Rp, 17.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 17.600.000.000,00 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 28.750.000.000,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 11.150.000.000,00) atau (38.78) % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	-	-	-	-	-	-
2 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	17.600.000.000,00	17.600.000.000,00	100,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)	(38,78)
Jumlah	17.600.000.000,00	17.600.000.000,00	100,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)	(38,78)

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.2 BELANJA MODAL Rp 381.985.870,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp, 387.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 381.985.870,00 atau 98.70 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.371.343.300,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 989.357.430,00) atau (72.15) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran					
		Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.000.000,00	219.200.000,00	98,74	1.201.340.800,00	(982.140.800,00)	(81,75)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	1.449.000,00	(1.449.000,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	165.000.000,00	162.785.870,00	98,66	168.553.500,00	(5.767.630,00)	(3,42)
Jumlah		387.000.000,00	381.985.870,00	98,70	1.371.343.300,00	(989.357.430,00)	(72,15)

Belanja Modal **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp,00

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil					
2	Belanja Modal Tanah Non Persil					
3	Belanja Modal Lapangan					
Jumlah						

Belanja Modal Tanah **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 219.200.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp, 222.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 219.200.000,00 atau 98.74 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.201.340800,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 982.140.800,00) atau (81.75) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	87.500.000,00	85.100.000,00	97,26	359.240.800,00	(274.140.800,00)	(76,31)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000,00	49.600.000,00	99,20	493.800.000,00	(444.200.000,00)	(89,96)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-
10	Belanja Modal Komputer	84.500.000,00	84.500.000,00	100,00	348.300.000,00	(263.800.000,00)	(75,74)
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	-
16	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-	-	-
17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-
18	Belanja Modal Rambu-rambu	-	-	-	-	-	-
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-	-
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-	-	-
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	-	-	-	-	-	-
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		222.000.000,00	219.200.000,00	98,74	1.201.340.800,00	(982.140.800,00)	(81,75)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp, 85.100.000,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp, 87.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 85.100.000,00 atau 97.26 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 359.240.800,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 274.140.800,00) atau (76.31) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000,00	14.400.000,00	96,00	-	14.400.000,00	-
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	72.500.000,00	70.700.000,00	97,52	359.240.800,00	(288.540.800,00)	(80,32)
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-	-	-
Jumlah		87.500.000,00	85.100.000,00	97,26	359.240.800,00	(274.140.800,00)	(76,31)

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp, 49.600.000,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp, 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 49.600.000,00 atau 99.20 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 493.800.000,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 444.200.000,00) atau (89.96) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000,00	49.600.000,00	99,20	493.800.000,00	(444.200.000,00)	(89,96)
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah		50.000.000,00	49.600.000,00	99,20	493.800.000,00	(444.200.000,00)	(89,96)

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Komputer Rp 84.500.000,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp, 84.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp, 84.500.000,00 atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 348.300.000,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 263.800.000,00) atau (75.74) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran						
		Setelah	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan		
		Perubahan				(Rp)		
		(Rp)						
1	Belanja							
	Modal							
	Komputer	84.500.000,00	84.500.000,00	100,00	313.300.000,00	(228.800.000,00)	(73,03)	
2	Unit							
	Belanja							
	Modal							
	Peralatan	-	-	-	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
	Komputer							
	Jumlah	84.500.000,00	84.500.000,00	100,00	348.300.000,00	(263.800.000,00)	(75,74)	

Belanja Modal Komputer **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 00,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp, 00,00 dengan realisasi sebesar Rp, 00,00 atau 0 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.449.000,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 1.449.000,00) atau (100) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran						
		Setelah	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan		
		Perubahan				(Rp)		
		(Rp)						
1	Belanja Modal Bahan	-	-	-	1.449.000,00	(1.449.000,00)	(100,00)	
	Perpustakaan							
2	Belanja Modal Barang	-	-	-	-	-	-	
	Bercorak							
	Kesenian/Kebudayaan/							
	Olahraga							
3	Belanja Modal Hewan	-	-	-	-	-	-	
4	Belanja Modal Biota	-	-	-	-	-	-	
	Perairan							
5	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	
	Tanaman							
6	Belanja Modal Barang	-	-	-	-	-	-	
	Koleksi Non Budaya							
7	Belanja Modal Aset	-	-	-	-	-	-	
	Tetap Dalam Renovasi							
8	Belanja Modal Aset	-	-	-	-	-	-	
	Tidak Berwujud							
9	Belanja Modal Aset	-	-	-	-	-	-	
	Tetap Lainnya BOS							
10	Belanja Modal Aset	-	-	-	-	-	-	
	Tetap Lainnya BOSP							
11	Belanja Modal Aset	-	-	-	-	-	-	
	Tetap Lainnya BLUD							
Jumlah		-	-	-	1.449.000,00	(1.449.000,00)	(100,00)	

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2.2.5.1 **Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp 00,00**

Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp, 00,00 dengan realisasi sebesar Rp, 00,00 atau 0 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.449.000,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar (Rp, 1.449.000,00) atau (100) % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran					
		Setelah			Kenaikan/Penurunan		
		Perubahan	2025		2024 (Rp)		
		(Rp)	(Rp)	%		(Rp)	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	1.449.000,00	(1.449.000,00)	(100,00)
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Kartografi,Naskah, Dan Lukisan Lainnya	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Musik	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Material) Lainnya"	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Modal Tarscalt	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	1.449.000,00	(1.449.000,00)	(100,00)

Belanja Modal Bahan Perpustakaan **tidak mencapai target*** dikarenakan :-

5.1.2 **PEMBIAYAAN DAERAH Rp,00**

Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran	2025 (Rp)	%	2024(Rp)	Kenaikan/Penurunan
		Setelah				(Rp)
		Perubahan (Rp)				
1	Penerimaan Pembiayaan					
2	Pengeluaran Pembiayaan					
Jumlah						

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET Rp 27.402.471.372,54

Total Aset sebesar Rp, 27.402.471.372,54 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 27.919.956.443,68 Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aset Lancar	111.060.359,87	101.167.719,46
2	Investasi Jangka Panjang	-	-
3	Aset Tetap	26.844.995.810,10	27.344.775.405,86
4	Dana Cadangan	-	-
5	Aset Lainnya	446.415.202,57	474.013.318,36
6	Properti Investasi	-	-
	Jumlah	27.402.471.372,54	27.919.956.443,68

5.2.1.1 ASET LANCAR Rp 111.060.359,87

Aset Lancar sebesar Rp, 111.060.359,87 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 101.167.719,46 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	-	-
2	Investasi Jangka Pendek	-	-
3	Piutang Pajak Daerah	-	-
4	Piutang Retribusi Daerah	-	-
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
8	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9	Piutang Lainnya	-	-
10	Penyisihan Piutang	-	-
11	Beban Dibayar Dimuka	107.581.359,87	99.783.319,46
12	Persediaan	3.479.000,00	1.384.400,00
	Jumlah	111.060.359,87	101.167.719,46

5.2.1.1.10 **Beban Dibayar Dimuka Rp 107.581.359,87**

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp, 107.581.359,87 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 99.783.319,46 dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	-	-
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	-	-
3	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	107.581.359,87	99.783.319,46
	Jumlah	107.581.359,87	99.783.319,46

5.2.1.1.10.3 **Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah Rp 107.581.359,87**

Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp, 107.581.359,87 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 99.783.319,46 dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Tanah	-	-
2	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan dan Mesin	72.953.658,61	68.432.862,69
3	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Gedung dan Bangunan	34.627.701,27	31.350.456,78
	Jumlah	107.581.359,87	99.783.319,46

5.2.1.1.11 **Persediaan Rp 3.479.000,00**

Persediaan sebesar Rp, 3.479.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.384.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	3.479.000,00	1.384.400,00
2	Barang Tak Habis Pakai	-	-
3	Barang Bekas Pakai	-	-
	Jumlah	3.479.000,00	1.384.400,00

5.2.1.1.11.1 **Barang Pakai Habis Rp 3.479.000,00**

Barang Pakai Habis sebesar Rp, 3.479.000,00,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.384.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bahan	-	-
2	Suku Cadang	-	-
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.479.000,00	1.384.400,00

4	Obat-obatan	-	-
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
7	Natura dan Pakan	-	-
8	Persediaan Penelitian	-	-
9	Persediaan dalam Proses	-	-
Jumlah		3.479.000,00	1.384.400,00

5.2.1.1.11.1.3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp 3.479.000,00

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp, 3.479.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.384.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	899.000,00	298.400,00
2	Kertas dan Cover	890.000,00	361.000,00
3	Bahan Cetak	-	-
4	Benda Pos	-	-
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-
6	Bahan Komputer	1.240.000,00	725.000,00
7	Perabot Kantor	300.000,00	-
8	Alat Listrik	-	-
9	Perlengkapan Dinas	-	-
10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-
11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-
12	Suvenir/Cendera Mata	-	-
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	150.000,00	-
Jumlah		3.479.000,00	1.384.400,00

5.2.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG Rp 00

Aset Tetap sebesar Rp, 00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 00 dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-
Jumlah		-	-

5.2.1.3 **Aset Tetap Rp 26.844.995.810,10**

Aset Tetap sebesar Rp, 26.844.995.810,10 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 27.344.755.405,86 dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah	17.413.941.740,00	17.413.941.740,00
2	Peralatan dan Mesin	11.302.212.320,00	11.083.012.320,00
3	Gedung dan Bangunan	10.620.119.060,00	10.620.119.060,00
4	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	39.142.400,00	39.142.400,00
5	Aset Tetap Lainnya	151.172.400,00	151.172.400,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	710.423.000,00	710.423.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(13.392.015.109,90)	(12.673.035.514,14)
8	Aset Konsesi Jasa	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-
	Jumlah	26.844.995.810,10	27.344.775.405,86

5.2.1.3.1 **Tanah Rp 17.413.941.740,00**

Tanah sebesar Rp, 17.413.941.740,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 17.413.941.740,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah Persil	1.513.941.740,00	1.513.941.740,00
2	Tanah Non Persil	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00
3	Lapangan	-	-
	Jumlah	17.413.941.740,00	17.413.941.740,00

5.2.1.3.1.1 **Tanah Persil Rp 1.513.941.740,00**

Tanah Persil sebesar Rp, 1.513.941.740,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.513.941.740,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	-
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-
3	Tanah untuk Bangunan Industri	-	-
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.513.941.740,00	1.513.941.740,00
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	-	-
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	-	-
7	Tanah Persil Lainnya	-	-
	Jumlah	1.513.941.740,00	1.513.941.740,00

5.2.1.3.1.2 Tanah Non Persil Rp 15.900.000.000,00

Tanah Non Persil sebesar Rp, 15.900.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 15.900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah Basah	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00
2	Tanah Kering	-	-
3	Tanah Perkebunan	-	-
4	Tanah Hutan	-	-
6	Tanah Tandus	-	-
7	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	-	-
5	Tanah Pertanian	-	-
8	Tanah Pertambangan	-	-
9	Tanah Non Persil Lainnya	-	-
	Jumlah	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00

5.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin Rp 11.302.212.320,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp, 11.302.212.320,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 11.083.012.320,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Besar	575.080.900,00	575.080.900,00
2	Alat Angkutan	4.042.985.783,00	4.042.985.783,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4	Alat Pertanian	-	-
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.396.028.520,00	3.261.328.520,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.060.974.537,00	1.060.974.537,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Alat Laboratorium	-	-
9	Alat Persenjataan	-	-
10	Komputer	2.117.217.580,00	2.032.717.580,00
11	Alat Eksplorasi	-	-
12	Alat Pengeboran	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Alat Peraga	99.825.000,00	99.825.000,00
17	Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Rambu-rambu	-	-
19	Peralatan Olahraga	10.100.000,00	10.100.000,00
	Jumlah	11.302.212.320,00	11.083.012.320,00

5.2.1.3.2.1 **Alat Besar Rp 575.080.900,00**

Alat Besar sebesar Rp, 575.080.900,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 575.080.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Besar Darat	-	-
2	Alat Besar Apung	-	-
3	Alat Bantu	575.080.900,00	575.080.900,00
	Jumlah	575.080.900,00	575.080.900,00

5.2.1.3.2.2 **Alat Angkutan Rp 4.042.985.783,00**

Alat Angkutan sebesar Rp, 4.042.985.783,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 4.042.985.783,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.042.985.783,00	4.042.985.783,00
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-
3	Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-
4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-
5	Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-
	Jumlah	4.042.985.783,00	4.042.985.783,00

5.2.1.3.2.5 **Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 3.396.028.520,00**

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp, 3.396.028.520,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 3.261.328.520,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Kantor	857.582.660,00	843.182.660,00
2	Alat Rumah Tangga	2.261.549.060,00	2.141.249.060,00
3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	276.896.800,00	276.896.800,00
	Jumlah	3.396.028.520,00	3.261.328.520,00

5.2.1.3.2.6 **Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 1.060.974.537,00**

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp, 1.060.974.537,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.060.974.537,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Studio	931.050.537,00	931.050.537,00
2	Alat Komunikasi	129.924.000,00	129.924.000,00
3	Peralatan Pemancar	-	-
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-
Jumlah		1.060.974.537,00	1.060.974.537,00

5.2.1.3.2.10 **Komputer Rp 2.117.217.580,00**

Komputer sebesar Rp, 2.117.217.580,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 2.032.717.580,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Komputer Unit	1.376.263.270,00	1.312.963.270,00
2	Peralatan Komputer	740.954.310,00	719.754.310,00
Jumlah		2.117.217.580,00	2.032.717.580,00

5.2.1.3.2.16 **Alat Peraga Rp 99.825.000,00**

Alat Peraga sebesar Rp, 99.825.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 99.825.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	99.825.000,00	99.825.000,00
Jumlah		99.825.000,00	99.825.000,00

5.2.1.3.2.19 **Peralatan Olahraga Rp 10.100.000,00**

Peralatan Olahraga sebesar Rp, 10.100.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 10.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Peralatan Olahraga	10.100.000,00	10.100.000,00
Jumlah		10.100.000,00	10.100.000,00

5.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp 10.620.119.060,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp, 10.620.119.060,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 10.620.119.060,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bangunan Gedung	10.620.119.060,00	10.620.119.060,00
2	Monumen	-	-
3	Bangunan Menara	-	-
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
Jumlah		10.620.119.060,00	10.620.119.060,00

5.2.1.3.3.1 Bangunan Gedung Rp 10.620.119.060,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp, 10.620.119.060,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 10.620.119.060,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.620.119.060,00	10.620.119.060,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-
Jumlah		10.620.119.060,00	10.620.119.060,00

5.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp, 39.142.400,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp, 39.142.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	-	-
2	Bangunan Air	-	-
3	Instalasi	39.142.400,00	39.142.400,00
4	Jaringan	-	-
Jumlah		39.142.400,00	39.142.400,00

5.2.1.3.4.3 Instalasi Rp, 39.142.400,00

Instalasi sebesar Rp, 39.142.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-
2	Instalasi Air Kotor	-	-
3	Instalasi Pengolahan Sampah	-	-
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-
6	Instalasi Pembangkit Listrik	39.142.400,00	39.142.400,00
7	Instalasi Gardu Listrik	-	-
5	Instalasi Pertahanan	-	-

		-	-
8	Instalasi Gas	-	-
9	Instalasi Pengaman	-	-
10	Instalasi Lain	-	-
Jumlah		39.142.400,00	39.142.400,00

5.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya Rp 151.172.400,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp, 151.172.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 151.172.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	151.002.400,00	151.002.400,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	170.000,00	170.000,00
3	Hewan	-	-
4	Biota Perairan	-	-
5	Tanaman	-	-
6	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
Jumlah		151.172.400,00	151.172.400,00

5.2.1.3.5.1 Bahan Perpustakaan Rp 151.002.400,00

Bahan Perpustakaan sebesar Rp, 151.002.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 151.002.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	151.002.400,00	151.002.400,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-
4	Musik	-	-
5	Karya Grafika (Graphic Material)	-	-
6	Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-
7	Tarscalt	-	-
Jumlah		151.002.400,00	151.002.400,00

5.2.1.3.5.2 **Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga Rp 170.000,00**

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebesar Rp, 170.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 170.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Barang Bercorak Kesenian	-	-
2	Alat Bercorak Kebudayaan	70.000,00	70.000,00
3	Tanda Penghargaan	100.000,00	100.000,00
	Jumlah	170.000,00	170.000,00

5.2.1.3.6 **Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 710.423.000,00**

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp, 710.423.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 710.423.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	-	-
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	-	-
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	710.423.000,00	710.423.000,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah	710.423.000,00	710.423.000,00

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DED KAWASAN TUGU BATAS JATENG-JATIM GIRIMOYO WONOGIRI	GIRIWOYO WONOGIRI	027:/2238	70.086.000,00	Terkait eksisting di lapangan tidak sesuai dengan DED, sehingga tidak dapat dilaksanakan.	0	0
2.	PEMBANGUNAN RUSUNAWA KOTA SEMARANG	PLAMONGAN SARI SEMARANG	027.2.1211	640.337.000,00	Berdasarkan Kepmendagri 050/3708 Tahun 2020, yang menjadi urusan Provinsi yaitu Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus. Apabila akan membangun Rusun,	0	0

					pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan rusun yang berada di lahan asetnya. kewenangan pengelolaan berada di pemkab/pemkot sehingga rusun yg dibangun perlu melalui proses serah terima kepada pemkab/pemkot.		
--	--	--	--	--	--	--	--

5.2.1.3.6.4 **Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan Rp 710.423.000,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp, 710.423.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 710.423.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	710.423.000,00	710.423.000,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Monumen	-	-
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara	-	-
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
Jumlah		710.423.000,00	710.423.000,00

5.2.1.3.7 **Akumulasi Penyusutan Rp (13.392.015.109,90)**

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp,(13.392.015.109,90), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (12.673.035.514,14), dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.582.034.878,82)	(8.922.548.684,15)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.808.920.124,41)	(3.750.405.283,32)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.060.106,67)	(81.546,67)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah		(13.392.015.109,90)	(12.673.035.514,14)

5.2.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp (9.582.034.878,82)

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp, (9.582.034.878,82), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (8.922.548.684,15), dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(483.370.787,50)	(411.485.675,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(3.754.548.283,00)	(3.696.860.783,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.869.324.057,33)	(2.699.310.269,33)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(699.179.320,33)	(590.517.520,33)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.723.918.680,70)	(1.482.663.186,53)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(41.593.749,96)	(31.611.249,96)
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(10.100.000,00)	(10.100.000,00)
	Jumlah	(9.582.034.878,82)	(8.922.548.684,15)

5.2.1.3.7.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Rp (483.370.787,50)

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar Rp, (483.370.787,50) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (411.485.675,00) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Tractor	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Grader	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Excavator	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Pile Driver	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Hauler	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Asphalt Equipment	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Compacting Equipment	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Aggregate and Concrete Equipment	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Loader	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Alat Pengangkat	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Mesin Proses	-	-

12	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Floating Excavator	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(460.495.787,50)	(394.710.675,00)
25	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(22.875.000,00)	(16.775.000,00)
23	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tatoo	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountaineering	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	-	-
Jumlah		(483.370.787,50)	(411.485.675,00)

5.2.1.3.7.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Rp (3.754.548.283,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp, (3.754.548.283,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (3.696.860.783,00) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(609.678.000,00)	(609.678.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(3.021.745.152,00)	(2.964.057.652,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(123.125.131,00)	(123.125.131,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	-	-

9	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	-	-
Jumlah		(3.754.548.283,00)	(3.696.860.783,00)

5.2.1.3.7.1.5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp (2.869.324.057,33)

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp, (2.869.324.057,33) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (2.699.310.269,33)dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(23.290.000,00)	(23.290.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(6.750.000,00)	(6.750.000,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(552.746.333,35)	(544.806.333,35)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(185.644.257,33)	(161.854.529,33)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Meubelair	(724.538.576,67)	(667.000.176,67)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah		

	Tangga-Alat Pendingin	(720.993.423,32)	(659.211.096,66)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(406.429.666,66)	(394.606.333,32)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(78.356.800,00)	(78.356.800,00)
16	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(170.575.000,00)	(163.435.000,00)
Jumlah		(2.869.324.057,33)	(2.699.310.269,33)

5.2.1.3.7.1.6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp (699.179.320,33)

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp, (699.179.320,33) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (590.517.520,33) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(343.563.124,97)	(308.849.124,97)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(224.035.262,02)	(150.549.862,02)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(1.656.933,34)	(1.194.533,34)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(110.124.000,00)	(110.124.000,00)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(19.800.000,00)	(19.800.000,00)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Satelit	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	-	-

18	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	-	-
25	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO	-	-
35	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load	-	-
36	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	-	-
37	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder	-	-
39	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	-	-
40	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	-	-
41	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF	-	-
43	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	-	-
44	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF	-	-
45	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	-	-
46	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF	-	-
47	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF	-	-
48	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF	-	-
49	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	-	-
50	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	-	-
51	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	-	-
52	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	-	-
53	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	-	-

54	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	-	-
55	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	-	-
56	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	-	-
57	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	-	-
58	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	-	-
59	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	-	-
60	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	-	-
61	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	-	-
62	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	-	-
63	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	-	-
64	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	-	-
65	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	-	-
66	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	-	-
67	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)	-	-
68	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	-	-
69	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	-	-
70	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	-	-
71	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	-	-
72	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	-	-
Jumlah		(699.179.320,33)	(590.517.520,33)

5.2.1.3.7.1.10 Akumulasi Penyusutan Komputer Rp (1.723.918.680,70)

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar Rp, (1.723.918.680,70) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (1.482.663.186,53) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(69.530.000,00)	(69.530.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.130.361.603,31)	(1.010.664.936,64)
3	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(83.500.000,00)	(36.500.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(354.251.660,70)	(294.307.833,20)
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(86.275.416,69)	(71.660.416,69)
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-
	Jumlah	(1.723.918.680,70)	(1.482.663.186,53)

5.2.1.3.7.1.16 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Rp (41.593.749,96)

Akumulasi Penyusutan Alat Peraga sebesar Rp, (41.593.749,96) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (31.611.249,96) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	(41.593.749,96)	(31.611.249,96)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	-	-
	Jumlah	(41.593.749,96)	(31.611.249,96)

5.2.1.3.7.1.19 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga Rp (10.100.000,00)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga sebesar Rp, (10.100.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (10.100.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(10.100.000,00)	(10.100.000,00)
3	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	-	-
	Jumlah	(10.100.000,00)	(10.100.000,00)

5.2.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp (3.750.405.283,32)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp, (3.808.920.124,41) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (3.750.405.283,32) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(3.808.920.124,41)	(3.750.405.283,32)
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	-	-
Jumlah		(3.808.920.124,41)	(3.750.405.283,32)

5.2.1.3.7.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Rp (3.808.920.124,41)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp, (3.808.920.124,41) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (3.750.405.283,32) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(3.797.172.124,41)	(3.718.317.283,32)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(0,00)	(20.874.000,00)
9	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(11.748.000,00)	(11.214.000,00)

14	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan	-	-
25	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	-	-
35	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	-	-

36	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	-
37	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	-	-
39	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-	-
40	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	-	-
41	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	-	-
43	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	-	-
44	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	-	-
45	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	-	-
46	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	-	-
47	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	-	-
48	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen	-	-
49	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	-	-
50	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-
Jumlah		(3.808.920.124,41)	(3.750.405.283,32)

5.2.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp (1.060.106,67)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp, (1.060.106,67) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (81.546,67) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.060.106,67)	(81.546,67)
4	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-	-
Jumlah		(1.060.106,67)	(81.546,67)

5.2.1.3.7.3.3 Akumulasi Penyusutan Instalasi Rp (1.060.106,67)

Akumulasi Penyusutan Instalasi sebesar Rp, (1.060.106,67) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (81.546,67) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	-	-
25	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	(1.060.106,67)	(81.546,67)
27	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	-	-

28	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat	-	-
35	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan Lainnya	-	-
36	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	-	-
37	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas	-	-
39	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	-	-
40	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir	-	-
41	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Reaktor Nuklir	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	-	-
43	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Lainnya	-	-
44	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	-	-
Jumlah		(1.060.106,67)	(81.546,67)

5.2.1.4 DANA CADANGAN Rp 00

Aset Lainnya sebesar Rp, 00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 00 dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dana Cadangan	-	-
Jumlah		-	-

5.2.1.5 Aset Lainnya Rp 446.415.202,57

Aset Lainnya sebesar Rp, 446.415.202,57 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 474.013.318,36 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
3	Aset Tidak Berwujud	1.391.045.490,00	1.189.065.520,00
4	Aset Lain-lain	-	1.192.992.110,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(944.630.287,43)	(715.052.201,64)

6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(1.192.992.110,00)
7	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-
Jumlah		446.415.202,57	474.013.318,36

5.2.1.5.3 Aset Tak Berwujud Rp 1.391.045.490,00

Aset Tak Berwujud sebesar Rp, 1.391.045.490,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.189.065.520,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	1.391.045.490,00	1.189.065.520,00
2	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud	-	-
Jumlah		1.391.045.490,00	1.189.065.520,00

5.2.1.5.3.1 Aset Tak Berwujud Rp 1.391.045.490,00

Aset Tak Berwujud sebesar Rp, 1.391.045.490,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.189.065.520,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Goodwill	-	-
2	Lisensi dan Franchise	-	-
3	Hak Cipta	-	-
4	Hak Paten	-	-
5	Software	1.391.045.490,00	1.189.065.520,00
6	Kajian	-	-
7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
Jumlah		1.391.045.490,00	1.189.065.520,00

5.2.1.5.4 Aset Lain-lain Rp 00,00

Aset Lain-lain sebesar Rp, 00,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.192.992.110,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	-	1.192.992.110,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
Jumlah		-	1.192.992.110,00

5.2.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp (944.630.287,43)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp, (944.630.287,43) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, (715.052.201,64) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	-	-
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(944.630.287,43)	(715.052.201,64)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	-	-
	Jumlah	(944.630.287,43)	(715.052.201,64)

5.2.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp 00,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp, 00,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.192.992.110,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	(1.192.992.110,00)
	Jumlah	-	(1.192.992.110,00)

5.2.2 EKUITAS Rp, 18.988.707.464,46

Ekuitas sebesar Rp, (18.988.707.464,46), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 27.919.956.443,68 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ekuitas	(18.988.707.464,46)	27.919.956.443,68
2	Ekuitas SAL		
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
	Jumlah	(18.988.707.464,46)	27.919.956.443,68

5.2.2.1 Ekuitas

Ekuitas sebesar Rp, (18.988.707.464,46), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 27.919.956.443,68 dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ekuitas	28.068.373.539,70	27.919.956.443,68
2	Surplus/Defisit-LO	(47.057.081.004,16)	-
	Jumlah	(18.988.707.464,46)	27.919.956.443,68

5.2.2.2 Ekuitas SAL

Ekuitas SAL sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Estimasi Pendapatan		
2	Surplus/Defisit-LO		
3	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		
4	Apropriasi Belanja		
5	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		
6	Estimasi Perubahan SAL		
	Jumlah		

5.2.2.3 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp, 46.391.178.837,00, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp,00, dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	RK PPKD	46.391.178.837,00	-
	Jumlah	46.391.178.837,00	-

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan	-	-	-	-	-	-
2	Beban	46.009.192.967,00	1.198.142.497,04	150.254.459,88	47.057.081.004,16	61.908.372.573,16	(14.851.291.569,00)
	Surplus/(Defisit) Operasional	(46.009.192.967,00)	(1.198.142.497,04)	(150.254.459,88)	(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)	14.851.291.569,00
3	Kegiatan Non Operasional	-	-	-	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(46.009.192.967,00)	(1.198.142.497,04)	(150.254.459,88)	(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)	14.851.291.569,00
4	Pos Luar Biasa	-	-	-	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(46.009.192.967,00)	(1.198.142.497,04)	(150.254.459,88)	(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)	14.851.291.569,00

5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO Rp,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau 0 % dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO						
2	Pendapatan Transfer-LO						
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO						
	Jumlah						

5.3.2 BEBAN DAERAH Rp 47.057.081.004,16

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp, 61.908.372.573,16 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 61.908.372.573,16 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp, (14.851.291.569,00) atau (23.99) % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Operasional	47.057.081.004,16	61.908.372.573,16	(14.851.291.569,00)	(23,99)
2	Beban Transfer	-	-	-	-
	Jumlah	47.057.081.004,16	61.908.372.573,16	(14.851.291.569,00)	(23,99)

5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL Rp 47.057.081.004,16

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp, 47.057.081.004,16 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 61.908.372.573,16 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp, (14.851.291.569,00) atau (23.99) % dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Pegawai	12.698.935.072,00	13.603.409.204,00	(904.474.132,00)	(6,65)
Beban Barang dan Jasa	15.437.081.155,59	17.124.385.483,27	(1.687.304.327,68)	(9,85)
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	224.089.999,00	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)	(84,54)
Beban Bantuan Sosial	17.600.000.000,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)	(38,78)
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.096.974.777,57	980.744.251,89	116.230.525,68	11,85
Jumlah	47.057.081.004,16	61.908.372.573,16	(14.851.291.569,00)	(23,99)

5.3.2.1.1 Beban Pegawai Rp 12.698.935.072,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp, 12.698.935.072,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 13.603.409.204,00 mengalami kenaikan/penurunan* sebesar Rp, (904.474.132,00) atau (6.65) % dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.665.925.944,00	5.648.705.720,00	17.220.224,00	0,30
2 Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.033.009.128,00	7.516.943.484,00	(483.934.356,00)	(6,44)
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	437.760.000,00	(437.760.000,00)	(100,00)
4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-
5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-
6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-
7 Beban Pegawai BOS	-	-	-	-
8 Beban Pegawai BOSP	-	-	-	-
9 Beban Pegawai BLUD	-	-	-	-
Jumlah	12.698.935.072,00	13.603.409.204,00	(904.474.132,00)	(6,65)

5.3.2.1.2 **Beban Barang dan Jasa Rp 15.437.081.155,59**

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp, 15.437.081.155,59 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 17.124.385.483,27 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, (1.687.304.327,68) atau (9.85) % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang	2.651.501.091,00	4.340.668.793,00	(1.689.167.702,00)	(38,91)
2	Beban Jasa	9.857.204.803,59	6.357.840.813,27	3.499.363.990,32	55,04
3	Beban Pemeliharaan	566.949.914,00	686.716.971,00	(119.767.057,00)	(17,44)
4	Beban Perjalanan Dinas	2.278.625.347,00	5.721.158.906,00	(3.442.533.559,00)	(60,17)
5	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.800.000,00	18.000.000,00	64.800.000,00	360,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	-	-	-	-
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	-	-	-	-
Jumlah		15.437.081.155,59	17.124.385.483,27	(1.687.304.327,68)	(9,85)

5.3.2.1.3 **Beban Bunga Rp 00**

Beban Bunga terealisasi sebesar Rp, 00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 00 atau 00 % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-
2	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	-
3	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-	-
4	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	-	-	-
5	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat	-	-	-	-
6	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

5.3.2.1.4 **Beban Subsidi Rp 00**

Beban Subsidi terealisasi sebesar Rp, 00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 00 atau 00 % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Subsidi kepada BUMN	-	-	-	-
2	Beban Subsidi kepada BUMD	-	-	-	-

3	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	-
4	Beban Subsidi kepada Koperasi	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

5.3.2.1.5 **Beban Hibah Rp, 224.089.999,00**

Beban Hibah terealisasi sebesar Rp, 224.089.999,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 1.449.833.634,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, (1.225.743.635,00) atau (84.54) % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
3	Beban Hibah kepada BUMN	-	-	-	-
4	Beban Hibah kepada BUMD	-	-	-	-
5	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	224.089.999,00	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)	(84,54)
6	Beban Hibah Dana BOS	-	-	-	-
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	-
8	Beban Hibah Dana BOSP	-	-	-	-
9	Beban Hibah kepada BUMDesa	-	-	-	-
10	Beban Hibah kepada Koperasi	-	-	-	-
Jumlah		224.089.999,00	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)	(84,54)

5.3.2.1.6 **Beban Bantuan Sosial Rp, 17.600.000.000,00**

Beban Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp, 17.600.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 28.750.000.000,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, (11.150.000.000,00) atau (38.78) % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	17.600.000.000,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)	(38,78)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	-	-	-	-
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	-
Jumlah		17.600.000.000,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)	(38,78)

5.3.2.1.7 **Beban Penyisihan Piutang Rp, 00**

Beban Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp, 00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	-	-	-	-
3	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekyaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	-
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

5.3.2.2 **BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp 1.096.974.777,57**

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp, 1.096.974.777,57 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 980.744.251,89 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp, 116.230.525,68 atau 11.85 % dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	659.486.194,67	577.007.714,65	82.478.480,02	14,29
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	206.931.937,11	211.829.916,38	(4.897.979,27)	(2,31)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	978.560,00	81.546,67	897.013,33	1.100,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	229.578.085,79	191.825.074,19	37.753.011,60	19,68
7	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	-
8	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-
9	Beban Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
Jumlah		1.096.974.777,57	980.744.251,89	116.230.525,68	11,85

5.3.2.2.1 **Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin Rp 659.486.194,67**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp, 659.486.194,67 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 577.007.714,65 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 82.478.480,02 atau 14.29 % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar	71.885.112,50	71.885.112,50	-	-

2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	57.687.500,00	57.687.500,00	-	-
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	170.013.788,00	181.816.074,65	(11.802.286,65)	(6,49)
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	108.661.800,00	61.060.200,00	47.601.600,00	77,96
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	-	-
10	Beban Penyusutan Komputer	241.255.494,17	194.576.327,50	46.679.166,67	23,99
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	-
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	9.982.500,00	9.982.500,00	-	-
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
18	Beban Penyusutan Rambu-rambu	-	-	-	-
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-	-
Jumlah		659.486.194,67	577.007.714,65	82.478.480,02	14,29

5.3.2.2.2 **Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 206.931.937,11**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp, 206.931.937,11 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 211.829.916,37 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, (4.897.979,27) atau (2.31) % dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Beban Penyusutan				
1 Bangunan Gedung	206.931.937,11	211.829.916,38	(4.897.979,27)	(2,31)
Beban Penyusutan				
2 Monumen	-	-	-	-
Beban Penyusutan				
3 Bangunan Menara	-	-	-	-
Beban Penyusutan Tugu				
4 Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-
Jumlah	206.931.937,11	211.829.916,38	(4.897.979,27)	(2,31)

5.3.2.2.3 **Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 978.560,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan terealisasi sebesar Rp, 978.560,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 81.546,67 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 897.013,33 atau 1.100 % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-	#DIV/0!
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	-	-	-	#DIV/0!
3	Beban Penyusutan Instalasi	978.560,00	81.546,67	897.013,33	1.100,00
4	Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-	#DIV/0!
	Jumlah	978.560,00	81.546,67	897.013,33	1.100,00

5.3.2.2.6 **Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp 229.578.085,79**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp, 229.578.085,79 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 191.825.074,19 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp, 37.753.011,60 atau 19.68 % dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	-	-	-	-
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-	-	-
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-	-	-
4	Beban Amortisasi Software	229.578.085,79	191.825.074,19	37.753.011,60	19,68
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	-	-	-	-
	Jumlah	229.578.085,79	191.825.074,19	37.753.011,60	19,68

5.3.3 **BEBAN TRANSFER Rp,00**

Beban Transfer terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025(Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penuru nan (Rp)	Tren %
1	Beban Bagi Hasil							
2	Beban Bantuan Keuangan							
	Jumlah							

5.3.4 SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL

5.3.4.1 SURPLUS NON OPERASIONAL Rp,00

Surplus Non Operasional terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan(Rp)	Tren %
1 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya				
Jumlah				

5.3.4.2 DEFISIT NON OPERASIONAL Rp,00

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
2 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya				
Jumlah				

5.3.5 BEBAN TIDAK TERDUGA Rp,00

Beban Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah				

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Ekuitas Awal	27.919.956.443,68	27.447.242.807,87	472.713.635,81	1,72
2	Surplus/Defisit-LO	(47.057.081.004,16)	(61908.372.573,16)	14.851291569,00	(23,99)
3	RK-PPKD	46.391.178.837,00	62.366.955.709,00	-	-
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	148.417.096,02	14.130.499,97	134.286.596,05	950,33
	Ekuitas Akhir	27.402.471.372,54	27.919.956.443,68	15.458.291.800,86	928,06

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp, 27.919.956.443,68 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024.

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit – LO sebesar (Rp, 47.057.081.004,16) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2025.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp, 148.417.096,02 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024
1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-
8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	(393.792.937,00)
9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	148.417.096,02	407.923.436,97
10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
13	Koreksi/Penyesuaian Properti Investasi	-	-

14	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Properti Investasi	-	-
15	Koreksi/Penyesuaian Utang	-	-
16	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
Jumlah		148.417.096,02	14.130.499,97

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp, 27.402.471.372,54 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024
1	Ekuitas Akhir	27.402.471.372,54	27.919.956.443,68
Jumlah		27.402.471.372,54	27.919.956.443,68

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Sejarah Singkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisiensi.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsep pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Gubernur (*Strategic apex*),sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*Operating Core*), badan / fungsi penunjang (*Technostructure*), dan staf pendukung (*supportingstaff*).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*Technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas urusan Pemerintah dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang, unsur staf diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah diwadahi daam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah diwadahi dalam Inspektorat.

Kepala Daerah, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, dan Inspektur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggung jawaban tersebut sebagai fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkret, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan, pengkoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian, sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan factor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah di Undangkan, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau lagi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Jawa Tengah.

6.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

6.2.1. Kedudukan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6.2.2. Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas Pokok:

6.2.2..1. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Permukiman dan Tata Ruang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

6.2.2.2. Melaksanakan kewenangan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersifat lintas Kabupaten / Kota.

6.2.2.3. Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.2.4. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.3. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi

- 6.2.3.1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubemur.
- 6.2.3.2. Pengoordinasian Kebijaksanaan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, danKeterpaduan.
- 6.2.3.3. Pelaksanaan Kebijaksanaan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan.
- 6.2.3.4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasidan Pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahandan Keterpaduan.
- 6,2,3,5. Pelaksanaan dan Pembinaan Administrasi kesekretariatan kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas. dan
- 6.2.3.6. Pelaksanaan Fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan tugasnya.

6.3 Susunan Organisasi:

Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing- masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan keterpaduan berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Adapun tugas-tugas masing-masing bagian adaiah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas, membawahi:
 - a) Sekretariat
 - b) Bidang Perumahan
 - c) Bidang Kawasan Permukiman
 - d) Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - e) Bidang Pertanahan
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, Sekretariat membawahkan :

a) Sub Bagian Program

Subbagian program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

c) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas.

3) Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, Koordinasi dan pelaksanaan Kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis dan pembiayaan perumahan, perumahan umum serta perumahan swadya, membawahkan :

a) Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan

Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan.

b) Seksi Perumahan Umum

Seksi Perumahan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporandi bidang perumahan Umum, menyiapkan bahan penyediaan rumah korban bencana alam, bahan fasilitasi penyediaan rumah relokasi program pemerintah daerah, menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah susun dan rumah khusus serta rumah tapak sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan rumah tapak sederhana.

c) Seksi Perumahan Swadya

Seksi Perumahan Swadya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibiadng perumahan swadaya, bahan perumusan sosialisasi, bahan fasilitasi dan stimulan pembangunan, pemugaranrumah dan pemanfaatan rumah bagi korban bencana alam.

4) Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporandi bidang perencanaan teknis kawasan permukiman, dan peningkatan kualitas permukiman . Bidang Kawasan Permukiman membawahkan :

a) Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Perumahan

Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, meliputi : penyiapan kebijakan Teknis, bahan pengkoordinasian bahan penyusunan dan petunjuk teknis, bahan perencanaan teknis, bahan bimbingan teknis dan supervise pengembangan prasarana sarana utilitas, bahanevaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.

b) Seksi Pengembangan Prasarana Utilitas Kawasan

Seksi Pengembangan Prasarana Utilitas Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan perumahan swadaya, meliputi : perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pengkajian prasarana dan sarana utilitas, bahan pengembangan jejaringan kemitraan pengembangan prasarana dan sarana utilitas dan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana utilitas kawasan permukiman.

c) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman, meliputi : perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan bahan bimbingan teknis dan supervisi, bahan pengkajian dan penyusunan inovasi, peningkatan kualitas pengembangan jejaringan kemitraan bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman.

5) Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelola data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, keterpaduan infrastruktur, pembinaan dan evaluasi perumahan serta permukiman, membawahkan:

a) Seksi Pengelola Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Seksi Pengelola Data Permukiman, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanah meliputi : penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan penyusunan data base perumahan rakyat dan permukiman serta pertanahan.

b) Seksi Keterpaduan Infrastruktur.

Seksi Keterpaduan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keterpaduan infrastruktur meliputi : penyiapan Bahan kebijakan teknik, bahan pengkoordinasian, bahan penyusunan dan inventaris rencana induk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana pembangunan dan pengembangan, rencana strategis perumahan dan kawasan permukiman, monitoring pelaksanaan penyusunan dan perumusan rencana strategis 5 (lima) tahun dan tahunan, bahan fasilitasi program kemitraan pembangunan infrastruktur dan pertanahan, bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keterpaduan infrastruktur.

c) Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perumahan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan evaluasi perumahan, permukiman dan pertanahan meliputi : pelaksanaan pengawasan, pembinaan teknis dan pengendalian, evaluasi kinerja, implementasi hasil rekayasa teknologi, fasilitasi sertifikasi dan registrasi bagi orang / badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana utilitas umum dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan evaluasi perumahan, permukiman dan pertanahan.

6) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan. Bidang pertanahan membawahkan :

a) Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah

Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pengkoordinasian, bahan inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah, penetapan lokasi tanah, penyelesaian masalah ganti

kerugian dan santunan, bahan fasilitasi kegiatan pengadaan / pembebasan tanah untuk asset daerah beserta sertifikatnya, penetapan obyek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah, mengevaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengadaan tanah.

b) Seksi Permasalahan Pertanahan

Seksi Permasalahan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan inventarisasi permasalahan pertanahan kabupaten / kota, menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, bahan inventaris pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten / kota dan penyelasian masalah fasilitas dipermasalah pertanahan,

c) Seksi pembinaan dan Pengendalian Lahan

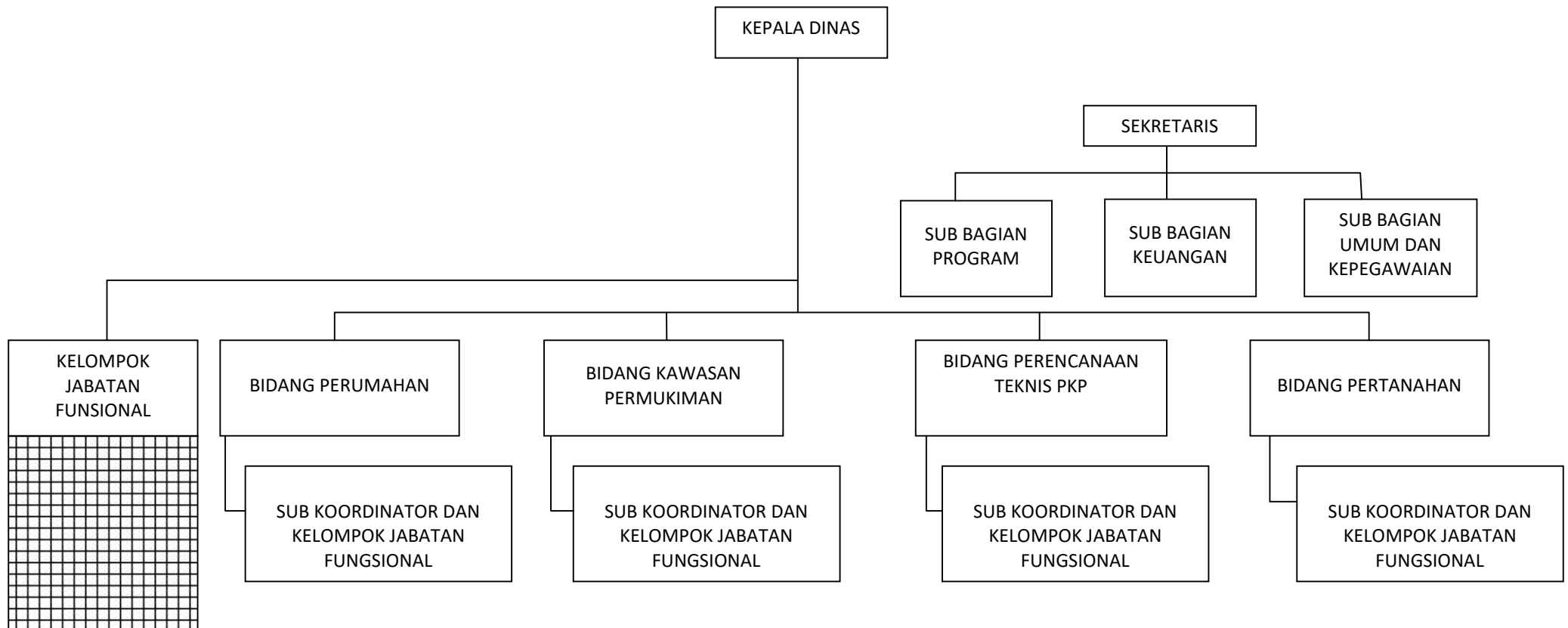
Seksi pembinaan dan Pengendalian pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian lahan, meliputi : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pengoordinasian, bahan fasilitasi peningkatan peran masyarakat, menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten / kota, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinan dan pengendalian pertanahan.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan- undangan yang berlaku. Berikut struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PROVINSI JAWA TENGAH



Gambar Struktur Organisasi

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran 2025. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Informasi ini sangat bermanfaat bagi Pengguna Anggaran dalam menilai akuntabilitas dalam membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi , sosial maupun kebijakan yang akan ditetapkan.

LAMPIRAN

Link Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 : <https://bit.ly/LK2025DISPERAKIM>



Daftar isi Lampiran Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 :

1. Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025
2. Rekap Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025
3. Berita Acara Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2025
4. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2025
5. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025